

Prada

Profil dan Analisis Daerah

Provinsi: SULAWESI UTARA, 2017

Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

7im Penyusun





Penanggung Jawab: Ir . Rudy S. Prawiradinata, MCRP, Ph.D Deputi Bidang Pengembangan Regional



Ketua Tim Pelaksana: **Drs. Oktorialdi, MA, Ph.D** Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan



Anggota Tim Pelaksana: Tri Dewi Virgiyanti, ST, MEM Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman



Anggota Tim Pelaksana: **Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D** Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan



Anggota Tim Pelaksana: Ir. Aryawan Soetiarso Poetro, MSI Direktur Otonomi Daerah



Anggota Tim Pelaksana: **Uke Muhammad Hussein, SSI, MPP** Direktur Tata Ruang dan Pertanahan

Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

Kata Pengantar



Di samping pertumbuhan (*growth*), keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara juga diukur melalui dimensi pemerataan (*equality*). Pembangunan yang semata-mata mengejar pertumbuhan diyakini akan menghasilkan berbagai kesenjangan atau ketimpangan, baik dalam bentuk kesenjangan dalam kesejahteraan individual masyarakat (antara kelompok kaya dengan kelompok miskin) maupun dalam bentuk kesenjangan antardaerah atau ketimpangan wilayah. Kesenjangan wilayah itu sendiri dapat diidentifikasi dalam berbagai manifestasi. Oleh sebab itu dalam ilmu kewilayahan dikenal berbagai macam kesenjangan, misalnya kesenjangan yang dilatarbelakangi perbedaan aktivitas ekonomi seperti antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, kesenjangan yang dipengaruhi faktor kondisi alam seperti antara wilayah pesisir dengan wilayah pedalaman, atau kesenjangan yang terjadi akibat faktor administratif seperti kesenjangan antar provinsi dan kesenjangan antar kabupaten/kota.

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antarwilayah menjadi fokus utama dalam kerangka pembangunan wilayah. Hal ini dapat dilihat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dimana disebutkan bahwa arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Selanjutnya dalam perspektif pembangunan wilayah, upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah tidak dapat dilakukan hanya dengan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, akan tetapi lebih jauh dari pada itu yakni pentingnya untuk memperhatikan faktor-faktor yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri, seperti pendidikan, kesehatan, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran serta ketersediaan infrastruktur pendukung wilayah lainnya. Faktor-faktor tersebut, merupakan kunci utama bagi daerah dalam upaya mengejar ketertinggalan dengan daerah lainnya, terlepas dari adanya perbedaan resources yang dimiliki oleh masing-masing wilayah.

Profil dan Analisis Daerah (PrADa) yang disusun ini dapat menjadi salah satu referensi bagi para pemangku kepentingan pembangunan dalam upaya mengurangi tingkat kesenjangan pembangunan antarwilayah, melalui program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah dengan fokus utama pada aspek pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.

Jakarta, Desember 2017 Deputi Bidang Pengembangan Regional,

Rudy S. Prawiradinata

Kedeputian Bidang Pengembangan Regional



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

| Bab-1 | PEN | DAHULUAN | 1 |
|-------|------|---|----|
| | 1.1. | Latar Belakang | 2 |
| | 1.2. | Tujuan | 4 |
| | 1.3. | Manfaat | 5 |
| Bab-2 | MET | TODOLOGI | 6 |
| | 2.1. | Lingkup Kegiatan | 7 |
| | 2.2. | Metode Analisis | 7 |
| Bab-3 | PERI | KEMBANGAN INDIKATOR MAKRO REGIONAL | 11 |
| | PRO | VINSI SULAWESI UTARA | |
| | 3.1. | Perkembangan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara | 12 |
| | 3.2. | Tingkat Kemiskinan | 13 |
| | 3.3. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 14 |
| | 3.4. | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 15 |
| Bab-4 | PrAI | Da PROVINSI SULAWESI UTARA | 16 |
| | 4.1. | Tematik Pendidikan | 19 |
| | 4.2. | Tematik Kesehatan | 27 |
| | 4.3. | Tematik Penanggulangan Kemiskinan | 35 |
| | 4.4. | Tematik Perumahan dan Permukiman | 42 |
| | 4.5. | Tematik Ketahanan Pangan | 52 |
| | 4.6. | Tematik Ketahanan Energi | 61 |
| | 4.7. | Tematik Infrastruktur | 69 |
| | 4.8. | Tematik Industri, Pariwisata, dan Sektor Unggulan | 76 |
| Bab-5 | PEN | UTUP | 81 |
| | 5.1. | Kesimpulan | 82 |
| | 5.2. | Rekomendasi | 87 |

Bab-1 PENDAHULUAN



1.1. Latar Belakang

Di samping pertumbuhan (growth), keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara juga diukur melalui dimensi pemerataan (equality). Pembangunan yang sematamata mengejar pertumbuhan diyakini akan menghasilkan berbagai kesenjangan atau ketimpangan, baik dalam bentuk kesenjangan dalam kesejahteraan individual masyarakat (antara kelompok kaya dengan kelompok miskin) maupun dalam bentuk kesenjangan antar-daerah atau ketimpangan wilayah. Berkaitan dengan itu, menurut Sumitro Djojohadikusumo, dua dari tiga masalah pembangunan jangka panjang Indonesia adalah bersangkutan dengan masalah ketimpangan atau kesenjangan, yaitu ketimpangan pada perimbangan kekuatan di antara golongan-golongan masyarakat dan ketidakseimbangan ekonomi antar-daerah. Satu masalah lainnya adalah persoalan lapangan kerja produktif dan pengangguran (Djojohadikusumo, 1994:191). Maka dapat dipahami jika masalah ketimpangan atau kesenjangan antar-daerah selalu menjadi salah satu isu utama pembangunan daerah di Indonesia.

Kesenjangan dalam perkembangan ekonomi adalah merupakan suatu keniscayaan, baik dalam tataran antar-negara maupun antar-daerah di suatu negara. Fenomena kesenjangan terjadi karena adanya perbedaan dalam alokasi berbagai faktor pertumbuhan ekonomi. Hirschman melihat bahwa kesenjangan bukan hanya terjadi dalam perkembangan ekonomi antar-negara, tetapi terjadi juga kesenjangan dalam perkembangan wilayah. Jika di dunia ini terdapat negara-negara maju dan negara-negara terbelakang, maka dalam suatu negara pun terdapat wilayah-wilayah yang maju dan wilayah-wilayah yang terbelakang (Nurzaman, 2002:91).

Kesenjangan wilayah itu sendiri dapat diidentifikasi dalam berbagai manifestasi. Oleh sebab itu dalam ilmu kewilayahan dikenal berbagai macam kesenjangan, misalnya kesenjangan yang dilatarbelakangi perbedaan aktivitas ekonomi seperti antara wilayah perkotaan dengan wilayah perdesaan, kesenjangan yang dipengaruhi faktor kondisi alam seperti antara wilayah pesisir dengan wilayah pedalaman, atau kesenjangan yang terjadi akibat faktor administratif seperti kesenjangan antar provinsi dan kesenjangan antar kabupaten/kota dan seterusnya. Dalam kerangka yang lebih luas, kesenjangan yang terjadi di Indonesia, khususnya antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih dilatarbelakangi oleh hampir seluruh perbedaan tersebut, yaitu aktivitas ekonomi, kondisi alam dan juga administratif.

Asal dari kesenjangan antar-daerah atau kesenjangan wilayah menurut Myrdal berakar pada persoalan non ekonomi dan berkaitan erat dengan sistem kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif ini mendorong terpusatnya pembangunan pada wilayah-wilayah yang memberikan harapan laba yang tinggi, sedangkan wilayah-wilayah yang tidak menjanjikan laba yang tinggi akan tetap terbelakang atau mengalami stagnasi (Myrdal dalam Roudo, 2004:25).

Banyak sekali teori dan konsep yang berusaha menjelaskan mekanisme terjadinya kesenjangan serta mekanisme untuk mengurangi kesenjangan itu. Teori polarization effect misalnya menjelaskan kecenderungan semakin besarnya kesenjangan akibat terjadinya aliran faktor produksi dari wilayah yang terbelakang ke wilayah maju, sementara teori trickling down effect menjelaskan kecenderungan kesenjangan yang semakin mengecil karena berpindahnya sumber daya (terutama modal) ke wilayah yang terbelakang akibat sudah tidak efisiennya lagi ekonomi di wilayah yang sudah maju. Dalam konsep yang lain namun masih dalam gagasan yang sama, fenomena membesarnya kesenjangan disebut sebagai akibat dari terjadinya backwash effect, sedangkan fenomena mengecilnya kesenjangan adalah akibat terjadinya spread effect. Pandangan optimis diwakili oleh Hirschman yang berpendapat bahwa pada suatu saat trickling down effect akan bekerja lebih kuat daripada polarization effect (sehingga kesenjangan akan berkurang), sementara Myrdal mewakili pandangan yang lebih pesimis karena menurutnya backwash effect akan selalu lebih besar daripada spread effect (yang artinya kesenjangan akan cenderung semakin besar).

Jadi permasalahannya meskipun kesenjangan adalah suatu keniscayaan dalam perkembangan wilayah, namun kecenderungan semakin membesarnya kesenjangan (divergensi) atau semakin mengecilnya kesenjangan (konvergensi) selalu menjadi bahan kajian yang menarik. Kuznets yang merupakan pelopor dalam analisis empirik terhadap pola-pola pertumbuhan historis di negara-negara maju, menemukan bahwa pada tahaptahap awal pertumbuhan distribusi pendapatan akan cenderung memburuk, tetapi akan membaik pada tahap-tahap berikutnya. Observasi inilah yang dikenal luas sebagai konsep kurva U-terbalik dari Kuznets (Kuncoro, 2004:129).

Pada tingkat wilayah atau regional, adalah Williamson yang mencoba memahami fenomena divergensi dan konvergensi wilayah secara empirik, yaitu dengan mengamati tingkat kesenjangan di berbagai negara yang mempunyai tingkat perkembangan (dinyatakan dengan PDRB) yang berbeda (Nurzaman, 2002:95). Williamson menemukan bahwa selama tahap awal pembangunan, disparitas atau kesenjangan regional menjadi lebih besar dan pembangunan terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu. Namun pada tahap pertumbuhan ekonomi yang lebih matang, tampak adanya keseimbangan antardaerah dan disparitas berkurang secara signifikan (Kuncoro, 2004:133). Dapat dikatakan bahwa Williamson adalah yang pertama kali secara eksplisit memberi dimensi spasial kepada kurva U-terbaliknya Kuznets, yaitu dengan tidak memfokuskan kepada kesenjangan pendapatan rumah tangga melainkan kepada kesenjangan antar-wilayah di tingkat pendapatan perkapita.

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antarwilayah menjadi fokus utama dalam kerangka pembangunan wilayah. Hal ini dapat dilihat di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019, dimana disebutkan bahwa arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan pada upaya untuk mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah tersebut bertumpu pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah sumber daya alam, penguatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata dengan memperhatikan posisi geostrategis regional dan global yang memanfaatkan secara optimal keberadaan *Sea Lane of Communication* (SloC) dan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk dapat mempercepat pengurangan kesenjangan pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah, harus dapat didukung dengan program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan pembangunan dimasing-masing daerah. Hal ini mengingat bahwa, masing-masing daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan oleh karenanya dalam menyusun usulan program/kegiatan yang akan dirumuskan tidak dapat disamaratakan (simetris) dan harus menggunakan pendekatan yang berbeda untuk setiap daerah (asimetris).

Selanjutnya untuk dapat menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, dibutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif untuk masing-masing daerah, khususnya yang terkait dengan indikator utama pembangunan daerah baik melalui pendekatan statistik maupun spasial. Sejalan dengan hal tersebut, Kedeputian Bidang Pengembangan Regional, telah melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksudkan di atas, dan untuk selanjutnya hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka merumuskan program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah.

2.2. Tujuan

- (1). Mengumpulkan dan menganalisis data-data statistik yang terkait dengan indikator utama pembangunan daerah, baik yang bersumber dari data primer maupun data sekunder;
- (2). Memetakan data-data yang diperoleh dari hasil analisis statistik/tabular ke dalam bentuk *Geographic Information System* (GIS);
- (3). Melaksanakan FGD dengan daerah, tujuannya adalah untuk mengetahui berbagai permasalahan-permasalahan yang didahapi dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah, khususnya yang terkait dengan tematik pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.
- (4). Melaksanakan konsinyiring/workshop di pusat (Jakarta), tujuannya adalah untuk memperoleh berbagai masukan/saran untuk penyempurnaan penyusunan PrADa, termasuk membahas hasil-hasil pelaksanaan FGD di daerah;
- (5). Menyusun rekomendasi kebijakan dalam bentuk indikasi program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah;
- (6). Menyusun laporan PrADa dalam rangka, yang dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka mempertajam perencanaan pembangunan nasional yang berbasis kewilayahan.

1.3. Manfaat

Manfaat dari terlaksana dan tersusunnya PrADa ini, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mensinergikan pelaksanaan pembangunan nasional/daerah, serta untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan utamanya dalam menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah. Disamping itu model analisis melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) yang dipergunakan dalam kegiatan penyusunan PrADa ini dapat menjadi salah satu instrumen dalam rangka mempersiapkan penyusunan *background study* RPJMN 2020-2024, yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.

Bal-2 METODOLOGI



2.1. Lingkup Kegiatan

Kegiatan penyusunan PrADa ini akan difokuskan pada tematik pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.

Ketahanan Pendidikan Pangan Ketahanan Kesehatan Energi 7ematik PrADa Penanggulangan Infrastruktur Kemiskinan Perumahan dan Industri dan Permukiman **Pariwisata**

Gambar 2.1 Lingkup Tematik Penyusunan PrADa

2.2. **Metode Analisis**

Model analisis yang dipergunakan dalam kegiatan ini melalui metode analisis dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Adapun yang dimaksud dengan "Tematik" adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan; "Holistik" adalah penjabaran tematik program ke dalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir suatu rangkaian kegiatan; "Integratif" adalah upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program yang dilihat dari peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan berbagai sumber pendanaan; dan "Spasial" adalah penjabaran program dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antar wilayah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.



Spasial Tematik Kategori: Kategori: Kategori: Kategori: Kategori: Ketersediaan Aksesibilitas Keterjangkauan Keberlanjutan **Stabilitas** Komponen: Komponen: Komponen: Komponen: Komponen: Sub-Kategori Sub-Kategori Sub-Kategori Sub-Kategori Sub-Kategori Indikator Indikator Indikator Indikator Indikator Integratif **Spasial**

Gambar 2.2

Metode Analisis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Penyusunan PrADa

Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

Lingkup substantif suatu tematik dalam kegiatan ini, dikelompokan ke dalam 5 (lima) kategori yang saling terkait satu sama lainnya (baik secara vertical maupun horizontal), yaitu (1) ketersediaan, digunakan untuk meganalisis ketersediaan layanan suatu tematik; (2) aksesibilitas, digunakan untuk menganalisis tingkat kemudahan masyarakat dalam mengakses, memperoleh dan/atau menggunakan layanan suatu tematik; (3) keterjangkauan, dipergunakan untuk menganalisis keterjangkauan masyarakat dari sisi biaya dalam rangka memperoleh dan/atau menggunakan layanan suatu tematik; (4) keberlanjutan, digunakan untuk menganalisis jaminan keberlanjutan terhadap layanan suatu tematik; dan (5) stabilitas, digunakan untuk menganalisis tingkat resiko bencana yang dapat menyebabkan terhentinya layanan suatu tematik. Selanjutnya penerapan metode analisis melalui pendekatan THIS ini, sebagaimana yang disajikan dalam Gambar 2.2 tersebut diatas, secara ilustratif diuraikan sebagai berikut:

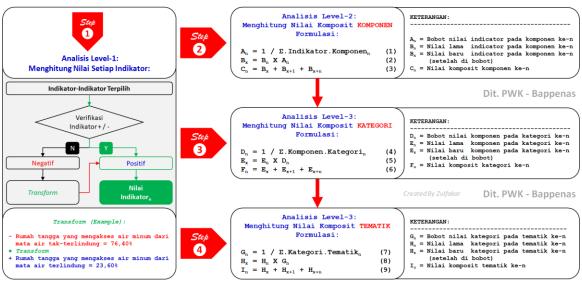
Analisis Tematik (Subject)

Tematik dalam kegiatan ini difokuskan pada tematik pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, ketahanan energi, infrastruktur, industri dan pariwisata.

• Analisis Holistik (Technochratic Planning),

Analisis holistik (*technochratic planning*), merupakan metode analisis hulu-hilir (komprehensif) yang secara **vertical** dapat digunakan untuk mengidentifikasi tingkat permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing wilayah, mulai dari level indikator, komponen, kategori sampai dengan tematik. Adapun alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis holistik ini disajikan pada Gambar 2.3 sebagai berikut:

Gambar 2.3
Formulasi Analisis Holistik (*Technochratic Planning*)
Penyusunan PrADa



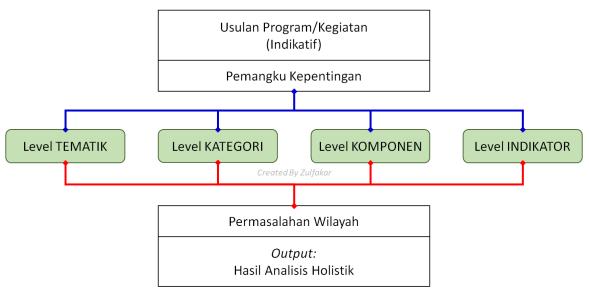
Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

Analisis Integratif (Coordination/Who's Doing What)

Analisis integratif (coordination/who's doing what), merupakan metode analisis yang secara horizontal digunakan untuk menyusun program/kegiatan yang sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, disertai dengan pemetaan peran dari para pemangku kepentingan dan pendanaannya (optional), mulai dari level indikator komponen, kategori sampai dengan tematik.

Dalam menerapkan analisis integratif ini terlebih dahulu yang harus dilakukan adalah melakukan analisis holistik. Hasil analisis holistik inilah yang kemudian menjadi dasar dalam menentukan langkah tindak lanjut dan peran para pemangku kepentingan sesuai tingkat permasalahannya, mulai dari level indikator komponen, kategori sampai dengan tematik. Adapun alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis integratif ini disajikan pada gambar 2.4 sebagai berikut:

Gambar 2.4
Analisis Integratif (*Coordination/Who's Doing What*)
Penyusunan PrADa

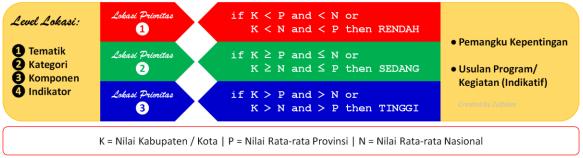


Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

Analisis Spasial (Spatially Bound)

Analisis spasial (*spatially bound*) merupakan metode analisis yang digunakan untuk memetakan lokasi-lokasi yang akan menjadi prioritas, yang akan terbagi ke dalam 3 (tiga) kelas, yaitu daerah dengan tingkat capaian rendah, sedang dan tinggi. Adapun alur proses dan formulasi dalam melakukan analisis spasial ini disajikan pada Gambar 2.5 sebagai berikut:

Gambar 2.5
Analisis Spasial (*Spatially Bound*) Penyusunan PrADa



Sumber: Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan, Kementerian PPN/Bappenas.

Bab-3

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO REGIONAL

Provinsi Sulawesi Utara



3.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Sulawesi Utara ²

Perekonomian provinsi Sulawesi Utara triwulan IV 2017 tumbuh meningkat dibandingkan triwulan III 2017 dari 6,49% menjadi 6,53%. Pertumbuhan tersebut lebih tinggi baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2016 yang tumbuh sebesar 6,49% maupun rata-rata pertumbuhan triwulan IV selama 5 tahun terakhir (2012-2016) sebesar 6,43%. Pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara tersebut juga lebih tinggi dibandingkan dengan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,19% pada triwulan IV 2017.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara triwulan IV 2017 didorong oleh beberapa faktor. Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan triwulan IV didorong oleh peningkatan konsumsi pemerintah, penurunan impor luar negeri dan penurunan net impor antar daerah. Dari sisi lapangan usaha, peningkatan kinerja konstruksi dan transportasi menjadi faktor pendorong peningkatan pertumbuhan triwulan IV 2017.

| INDIKATOR | 1 | | 2015 | | | | | 2016 | | | | | 2017 | | |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|-------|
| I. MAKRO NASIONAL | TWI | TW II | TW III | TW IV | TOTAL | TWI | TW II | TW III | TW IV | TOTAL | TWI | TW II | TW III | TW IV | TOTAL |
| A PDB Nasional (yoy) | 4,71 | 4,67 | 4,73 | 5,04 | 4,79 | 4,92 | 5,18 | 5,02 | 4,94 | 5,02 | 5,01 | 5,01 | 5,06 | 5,19 | 5,07 |
| B Inflasi Nasional (yoy) | 6,38 | 7,26 | 6,83 | 3,35 | 3,35 | 4,45 | 3,45 | 3,07 | 3,02 | 3,02 | 3,61 | 4,37 | 3,72 | 3,61 | 3,61 |
| II. MAKRO REGIONAL | TWI | TWII | TW III | TW IV | TOTAL | TWI | TWII | TW III | TW IV | TOTAL | TWI | TW II | TW III | TW IV | TOTAL |
| A 1. Laju Inflasi (ytd) % | (0,40) | 2,14 | 2,23 | 5,56 | 5,56 | (1,02) | (0,71) | (0,93) | 0,35 | 0,35 | 2,51 | 2,49 | 2,09 | 3,09 | 2,44 |
| 2. Laju Inflasi (yoy) % | 7,99 | 8,73 | 9,34 | 5,56 | 5,56 | 4,91 | 3,67 | 2,28 | 0,35 | 0,35 | 3,93 | 3,59 | 3,42 | 4,42 | 2,44 |
| 3. Laju Inflasi (mtm) % | 0,50 | 0,49 | 0,62 | 1,74 | 1,74 | (0,03) | 1,06 | (0,68) | (1,52) | (1,52) | 0,23 | 1,15 | (1,04) | (0,04) | 0,51 |
| 4. Inflasi Bahan Makanan (mtm) % | 0,59 | 1,21 | 2,37 | 5,93 | 5,93 | (2,51) | 3,62 | (3,56) | 1,69 | 1,69 | 0,62 | 2,29 | (4,08) | 0,81 | 0,81 |
| 5. Inflasi Makanan Jadi (mtm) % | 0,07 | 0,07 | 0,67 | 0,79 | 0,79 | 0,11 | 0,47 | 0,09 | 0,46 | 0,46 | (0,19) | 0,23 | 0,39 | 0,11 | 0,11 |
| 6. Inflasi Perumahan (mtm) % | 0,44 | 0,05 | 0,08 | 0,40 | 0,40 | (0,18) | 0,42 | 0,17 | 0,96 | 0,96 | 0,36 | 0,75 | 0,02 | 0,55 | 0,55 |
| 7. Inflasi Sandang (mtm) % | (0,12) | 0,36 | 0,07 | 0,38 | 0,38 | 0,14 | 0,32 | 0,03 | 0,52 | 0,52 | 0,20 | 0,39 | 0,13 | 0,44 | 0,44 |
| 8. Inflasi Kesehatan (mtm) % | 0,27 | 0,17 | 0,13 | 0,30 | 0,30 | - | 0,41 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,92 | 1,31 | 0,32 | - | - |
| 9. Inflasi Pendidikan (mtm) % | 0,31 | 0,27 | - | 0,35 | 0,35 | 0,05 | 0,03 | 0,05 | 0,14 | 0,14 | 0,06 | 0,17 | | 0,09 | 0,09 |
| 10. Inflasi Transportasi (mtm) % | 1,28 | 0,94 | (0,28) | 0,29 | 0,29 | (1,50) | (0,18) | 0,57 | 1,91 | 1,91 | (0,29) | 1,70 | (0,86) | 0,75 | 0,75 |
| B PDRB Penggunaan | 6,40 | 6,27 | 6,31 | 5,57 | 6,12 | 5,96 | 6,14 | 6,01 | 6,49 | 6,17 | 6,43 | 5,80 | 6,49 | 6,53 | 6,32 |
| - Konsumsi Rumah Tangga | 6,26 | 6,06 | 6,72 | 6,69 | 6,44 | 6,82 | 6,93 | 5,84 | 5,52 | 6,27 | 4,28 | 5,03 | 4,47 | 4,31 | 4,52 |
| - Konsumsi Lembaga Nonprofit Rumah Tangga | (11,86) | (1,55) | 5,65 | 9,75 | 0,25 | 5,57 | 5,45 | 5,60 | 2,67 | 4,76 | 6,24 | 7,41 | 5,18 | 3,91 | 5,63 |
| - Konsumsi Pemerintah | 7,19 | 7,80 | 10,96 | 13,00 | 9,94 | 8,94 | 11,37 | (1,50) | (6,55) | 2,32 | 2,72 | (0,30) | 9,98 | 10,00 | 5,81 |
| - Pembentukan Modal Tetap Bruto | 3,56 | 6,61 | 12,86 | 12,37 | 9,08 | 9,96 | 9,86 | 6,34 | 1,62 | 6,29 | 4,61 | 6,20 | 9,33 | 8,49 | 7,18 |
| - Perubahan Persediaan | (72,36) | (77,23) | (62,90) | 22,94 | (63,28) | (136,10) | (35,44) | (34,43) | (34,79) | (55,37) | (266,04) | (24,08) | (35,98) | (42,40) | 2,91 |
| - Ekspor Luar Negeri | (3,15) | (13,86) | (9,52) | (21,34) | (11,70) | (20,07) | (12,86) | (2,80) | 53,37 | 0,14 | 16,83 | (3,86) | 7,91 | (13,87) | 1,61 |
| - Impor Luar Negeri | 1,64 | (25,08) | 3,54 | 16,45 | (0,88) | 16,01 | 126,75 | 18,79 | (14,15) | 28,53 | (32,19) | (16,91) | 98,81 | 4,21 | 3,09 |
| - Net Ekspor Antardaerah | (8,21) | (9,23) | 8,49 | 7,27 | (1,38) | (9,44) | (16,26) | (11,50) | 12,41 | (7,48) | 11,85 | (4,17) | (6,15) | (12,70) | (1,75 |
| C PDRB Sektoral | 6,40 | 6,27 | 6,31 | 5,57 | 6,12 | 5,96 | 6,14 | 6,01 | 6,49 | 6,17 | 6,43 | 5,80 | 6,49 | 6,53 | 6,32 |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan | 4,27 | 4,43 | 2,83 | 0,66 | 2,95 | 0,90 | 2,11 | 4,08 | 5,72 | 3,67 | 5,38 | 4,66 | 4,21 | 4,08 | 4,42 |
| Pertambangan dan Penggalian | 12,40 | 8,35 | 7,48 | 5,30 | 8,17 | 3,56 | 0,81 | 0,81 | 3,85 | 4,42 | 9,45 | 9,81 | 10,71 | 5,20 | 9,07 |
| Industri Pengolahan | 4,57 | 3,67 | 0,83 | 1,80 | 2,65 | 2,68 | (1,23) | 1,82 | 1,45 | 1,11 | 6,53 | 7,17 | 8,11 | 9,37 | 8,00 |
| Pengadaan Listrik dan Gas | 31,93 | 4,35 | 2,99 | (5,05) | 6,76 | 8,10 | 30,18 | 27,07 | 2,43 | 17,52 | 2,22 | 1,07 | 5,11 | 10,19 | 4,79 |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 8,15 | 8,29 | (0,87) | (4,90) | 2,42 | 0,17 | 1,44 | 6,31 | 4,47 | 3,07 | 1,82 | 0,88 | (1,41) | 2,00 | 0,81 |
| Konstruksi | 7,12 | 7,53 | 11,25 | 11,48 | 9,49 | 9,88 | 9,86 | 6,23 | 5,76 | 6,89 | 5,45 | 6.35 | 8,94 | 8,59 | 7,46 |
| Perdagangan Besar dan Eceran | 6,09 | 5,49 | 5,44 | 6,65 | 5,93 | 6,53 | 7,91 | 7,23 | 4,76 | 6,05 | 5,41 | 4,73 | 5,64 | 5,45 | 5,68 |
| Transportasi dan Pergudangan | 8,78 | 7,99 | 7,06 | 5,47 | 7,25 | 7,83 | 8,47 | 9,94 | 10,14 | 9,24 | 7,61 | 6,04 | 4,45 | 5,41 | 5,64 |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 5,62 | 7,50 | 9,10 | 11,35 | 8,52 | 11,56 | 8,49 | 17,80 | 13,69 | 12,69 | 5,94 | 12,31 | 2,59 | 5,70 | 6,51 |
| Informasi dan Komunikasi | 8,20 | 9,23 | 8,75 | 9,52 | 8,95 | 8,24 | 8,94 | 9,86 | 9,03 | 9,20 | 9,40 | 9,35 | 4,32 | 6,17 | 6,71 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jasa Keuangan dan Asuransi | 6,79 | 2,58 | 10,26 | (3,32) | 3,91 | 12,41 | 21,09 | 14,82 | 28,36 | 19,16 | 7,67 | 7,62 | 6,83 | 4,27 | 6,68 |
| Real Estate | 7,56 | 7,14 | 7,21 | 7,76 | 7,42 | 7,00 | 6,90 | 7,31 | 7,03 | 7,08 | 8,87 | 7,09 | 7,00 | 7,13 | 7,36 |
| Jasa Perusahaan | 8,14 | 8,26 | 8,40 | 6,29 | 7,73 | 6,36 | 6,36 | 6,86 | 9,16 | 6,87 | 8,34 | 7,54 | 9,68 | 10,40 | 9,05 |
| Adm.i Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib | 8,37 | 9,24 | 8,74 | 9,47 | 8,99 | 8,07 | 8,76 | 1,47 | 2,03 | 4,72 | 3,89 | (1,92) | 9,71 | 9,28 | 5,44 |
| Jasa Pendidikan | 2,62 | 5,81 | 9,69 | 9,98 | 7,08 | 7,98 | 7,48 | 1,34 | 7,87 | 6,21 | 5,80 | 3,78 | 7,05 | 8,32 | 5,77 |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 4,46 | 9,35 | 9,16 | 8,36 | 7,88 | 7,10 | 6,82 | 9,89 | 8,80 | 8,02 | 8,71 | 8,37 | 6,49 | 7,11 | 7,49 |
| Jasa lainnya | 6,17 | 7,42 | 8,77 | 7,75 | 7,56 | 7,34 | 7,87 | 9,94 | 9,23 | 8,64 | 9,12 | 7,25 | 7,33 | 10,97 | 8,40 |

Untuk keseluruhan tahun 2017, pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara tercatat sebesar 6,32%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,17%. Meskipun meningkat, namun pertumbuhan tersebut masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan lima tahun terakhir (2012-2016) sebesar 6,37%. Selain itu, pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 juga paling rendah dibandingkan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya didorong oleh konsumsi pemerintah, investasi, kinerja ekspor dan impor. Sementara itu, dari sisi lapangan usaha, peningkatan pertumbuhan didorong oleh sektor pertanian dan konstruksi.

² Kajian Ekonomi Regional, Bank Indonesia.



_

3.2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan provinsi Sulawesi Utara periode Maret 2017, lebih rendah dari nasional, yaitu sebesar 8,10% dan nasional 10,64%. Sementara itu, untuk tingkat kemiskinan kabupaten/kota di wilayah provinsi Sulawesi Utara disajikan sebagai berikut:

| | Perkembangan Tingkat Kemiskinan Periode Maret 2017 | | | | | | | | | | |
|-----------|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| | Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional | | | | | | | | | | |
| NO. | Kabupaten/Kota | Jumlah Penduduk Miskin | Persentase Penduduk Miskin | Index Kedalaman Kemiskinan | Index Keparahan Kemiskinan | Garis Kemiskinan | | | | | |
| | | (Ribu Jiwa) | (Persen) | (P1) | (P2) | (Rp/Kapita/Bulan) | | | | | |
| 01. | Bolaang Mongondow Selatan | 9.05 | 14.16 | 2.11 | 0.52 | 288,862.00 | | | | | |
| 02. | Minahasa Tenggara | 15.56 | 14.08 | 2.47 | 0.60 | 298,736.00 | | | | | |
| 03. | Kepulauan Sangihe | 15.38 | 11.80 | 1.83 | 0.38 | 240,321.00 | | | | | |
| 04. | Siau Tagulandang Biaro | 6.81 | 10.33 | 1.58 | 0.35 | 276,800.00 | | | | | |
| 05. | Minahasa Selatan | 20.26 | 9.78 | 1.83 | 0.48 | 296,600.00 | | | | | |
| 06. | Kepulauan Talaud | 8.84 | 9.77 | 1.40 | 0.33 | 257,294.00 | | | | | |
| 07. | Bolaang Mongondow Utara | 6.95 | 8.89 | 1.11 | 0.20 | 230,974.00 | | | | | |
| 08. | Bolaang Mongondow | 19.05 | 8.02 | 1.32 | 0.36 | 287,751.00 | | | | | |
| 09. | Minahasa | 26.34 | 7.90 | 1.36 | 0.40 | 255,535.00 | | | | | |
| 10. | Minahasa Utara | 14.93 | 7.46 | 0.92 | 0.17 | 294,308.00 | | | | | |
| 11. | Kota Bitung | 14.00 | 6.62 | 1.23 | 0.39 | 356,120.00 | | | | | |
| 12. | Kota Tomohon | 6.68 | 6.47 | 0.88 | 0.20 | 354,635.00 | | | | | |
| 13. | Bolaang Mongondow Timur | 4.37 | 6.20 | 0.74 | 0.23 | 293,187.00 | | | | | |
| 14. | Kota Kotamobagu | 7.28 | 5.90 | 0.67 | 0.17 | 289,077.00 | | | | | |
| 15. | Kota Manado | 23.39 | 5.46 | 0.77 | 0.20 | 353,018.00 | | | | | |
| | SULAWESI UTARA | 198.88 | 8.10 | 1.37 | 0.35 | 333,510.00 | | | | | |
| | INDONESIA 7,771.00 10.64 1.83 0.48 361,496.00 | | | | | | | | | | |
| Sumber: I | Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) | | | | | | | | | | |
| | Tingkat kemiskinan kabupaten/kota, di ATAS provinsi dan nasional. | | | | | | | | | | |
| | Tingkat kemiskinan kabupaten/kota, | di ATAS provinsi, akan | tetapi berada di BAWA | H nasional. | | | | | | | |
| | Tingkat kemiskinan kabupaten/kota, | di BAWAH provinsi dan | nasional. | | | | | | | | |

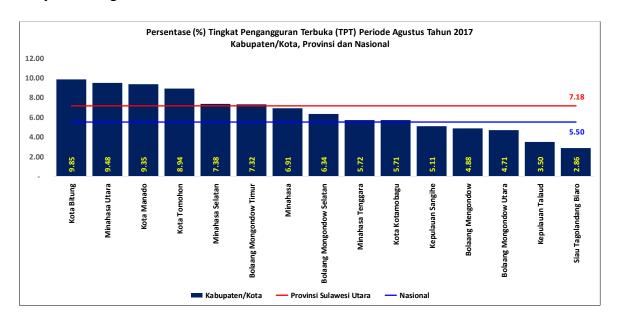
3.3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2016 menempati urutan ke 7 dari 34 provinsi, dengan nilai IPM sebesar 71,05 atau lebih tinggi dari nasional yaitu sebesar 70,18. Sementara itu, untuk indeks pembangunan manusia kabupaten/kota di wilayah provinsi Sulawesi Utara disajikan sebagai berikut:

| | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Komponennya Tahun 2016 Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional | | | | | | | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------------|-------|-------------------------|--|--|
| NO. | Kabupaten/Kota | AHH (Tahun) | HLS (Tahun) | RLS (Tahun) | Pengeluaran (Ribu Rp/Tahun) | IPM | Pertumbuhan (Persen) | | |
| 01. | Bolaang Mongondow Selatan | 64.00 | 12.21 | 7.71 | 8,371.00 | 63.92 | 0.31 | | |
| 02. | Bolaang Mongondow Timur | 67.27 | 11.46 | 7.52 | 8,361.00 | 64.44 | 0.99 | | |
| 03. | Bolaang Mongondow Utara | 66.91 | 11.86 | 7.67 | 8,593.00 | 65.16 | 1.08 | | |
| 04. | Siau Tagulandang Biaro | 69.72 | 11.24 | 8.45 | 7,742.00 | 65.66 | 1.01 | | |
| 05. | Bolaang Mongondow | 68.51 | 11.07 | 7.30 | 9,657.00 | 65.73 | 1.08 | | |
| 06. | Kepulauan Talaud | 69.41 | 12.13 | 8.92 | 8,184.00 | 67.58 | 0.98 | | |
| 07. | Minahasa Tenggara | 69.53 | 11.51 | 8.39 | 10,002.00 | 68.42 | 0.54 | | |
| 08. | Kepulauan Sangihe | 69.26 | 11.71 | 7.70 | 10,959.00 | 68.52 | 1.42 | | |
| 09. | Minahasa Selatan | 69.17 | 11.75 | 8.71 | 11,133.00 | 69.97 | 1.15 | | |
| 10. | Minahasa Utara | 70.82 | 12.13 | 9.24 | 10,789.00 | 71.49 | 0.56 | | |
| 11. | Kota Kotamobagu | 69.69 | 12.67 | 9.97 | 10,084.00 | 71.68 | 1.38 | | |
| 12. | Kota Bitung | 70.50 | 12.24 | 9.37 | 11,718.00 | 72.43 | 1.11 | | |
| 13. | Minahasa | 70.40 | 13.93 | 9.54 | 11,827.00 | 74.37 | 1.06 | | |
| 14. | Kota Tomohon | 71.07 | 14.16 | 10.23 | 10,936.00 | 74.91 | 0.73 | | |
| 15. | Kota Manado | 71.31 | 13.83 | 11.02 | 13,253.00 | 77.59 | 0.34 | | |
| | SULAWESI UTARA | 71.02 | 12.55 | 8.96 | 10,148.00 | 71.05 | 0.94 | | |
| | INDONESIA 70.90 12.72 7.95 104,201.00 70.18 0.91 | | | | | | | | |
| Sumber: B | Sumber: Badan Pusat Statistik (diolah) | | | | | | | | |
| | Tingkat pengangguran terbuka kabupa | aten/kota, di BAWAH p | rovinsi DAN nasional. | | | | | | |
| | Tingkat pengangguran terbuka kabupa | aten/kota, di ATAS prov | vinsi DAN nasional. | | | | | | |

3.4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

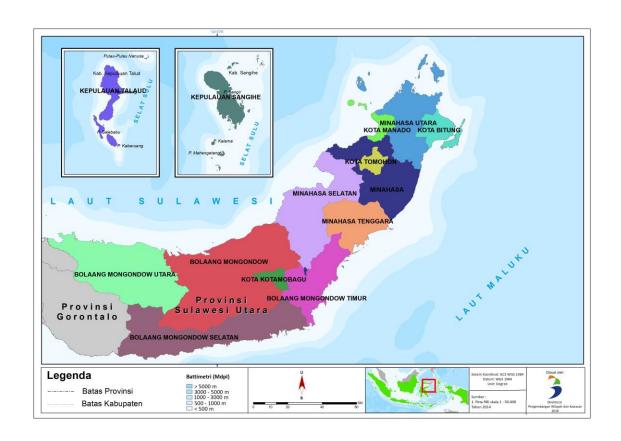
Tingkat pengangguran terbuka provinsi Sulawesi Utara periode Agustus 2017, lebih tinggi dari nasional, yaitu sebesar 7,18% dan nasional 5,50%. Sementara itu, untuk tingkat pengangguran terbuka kabupaten/kota di wilayah provinsi Sulawesi Utara disajikan sebagai berikut:



Bab-4

Prada

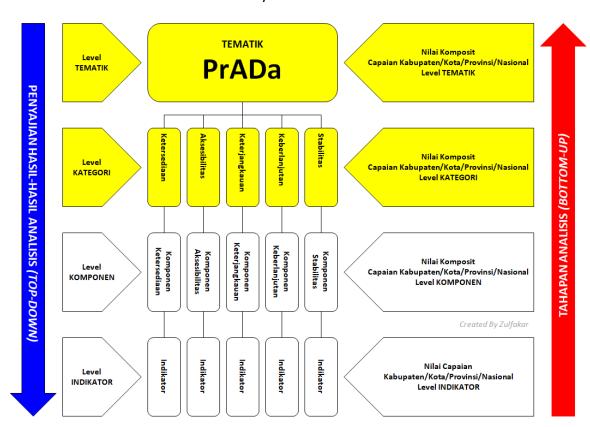
Provinsi Sulawesi Utara



Model analisis yang dipergunakan dalam penyusunan PrADa ini dilakukan melalui pendekatan metode analisis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Tematiknya adalah pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, perumahan dan permukiman, ketahanan pangan, infrastruktur, ketahanan energi, industri dan pariwisata.

Holistik (technoratic planning) terbagi ke dalam 4 level analisis yang saling terkait satu dengan yang lainnya, dimulai dari level indikator, komponen, kategori, dan tematik (bottom-up). Integratif (coordination/who's doing what) untuk memetakan peran para pemangku kepentingan (Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan Swasta) termasuk merumuskan program/kegiatan (indikatif), mulai dari level indikator, komponen, kategori, dan tematik. Spasial (spatially bound) untuk memetakan wilayah-wilayah dengan tingkat capaian terhadap indikator, komponen, kategori dan tematik rendah, sedang atau tinggi.

Gambar 4.1
Struktur dan Lingkup Penyajian Hasil Analisis
Penyusunan PrADa



Mengacu kepada Gambar 4.1 tersebut di atas, terlihat bahwa kalau dalam proses analisis menggunakan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*), yang dimulai dari level indikator, komponen, kategori sampai dengan tematik, maka dalam penyajian hasil analis justru sebaliknya, yaitu menggunakan pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*), dimulai dari level tematik sampai dengan level kategori.

Analisis level tematik, bertujuan untuk memetakan kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai komposit suatu tematik dengan tingkat capaian RENDAH, SEDANG dan TINGGI. Nilai komposit suatu tematik berasal dari 5 (lima) unsur kategori pembentuknya yaitu (1) ketersediaan, (2) aksesibilitas, (3) keterjangkauan, (4) keberlanjutan, dan (5) stabilitas.

Sementara itu, analisis level kategori, bertujuan untuk memetakan kabupaten/kota di wilayah provinsi Sumatera Barat yang memiliki nilai komposit kategori dengan tingkat capaian RENDAH, SEDANG dan TINGGI. Nilai komposit setiap kategori berasal dari masing-masing unsur komponen pembentuknya.

Adapun, dalam menentukan kabupaten/kota memiliki nilai komposit dengan tingkat capaian suatu tematik/kategori RENDAH, SEDANG dan TINGGI, ditentukan dengan 3 (tiga) kriteria sebagai berikut:

• Tingkat Capaian Tematik/Kategori Kabupaten/Kota RENDAH

Jika, nilai komposit kabupaten/kota lebih kecil dari nilai provinsi DAN nilai nasional, ATAU nilai kabupaten/kota lebih kecil dari nilai nasional DAN lebih kecil dari nilai provinsi.

Tingkat Capaian Tematik/Kategori Kabupaten/Kota SEDANG

Jika, nilai komposit kabupaten/kota lebih besar atau sama dengan nilai provinsi DAN lebih kecil atau sama dengan nilai nasional, ATAU nilai kabupaten/kota lebih besar atau sama dengan nilai nasional DAN lebih kecil atau sama dengan nilai provinsi.

Tingkat Capaian Tematik/Kategori Kabupaten/Kota TINGGI

Jika, nilai komposit kabupaten/kota lebih besar dari nilai provinsi DAN nilai nasional, ATAU nilai kabupaten/kota lebih besar dari nilai nasional DAN lebih besar dari nilai provinsi.



Tematik:

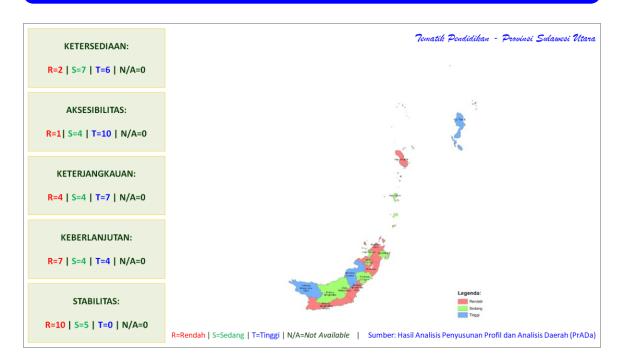
Pendidikan

Provinsi Sulawesi Utara



| Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kategori | Komponen | Indikator | | | | | | | |
| • Ketersediaan | • Murid | Rasio siswa/rombel SD; Rasio siswa/rombel SMP; Rasio siswa/rombel SMA; Rasio rombel/ruang kelas SD; Rasio rombel /ruang kelas SMP; Rasio rombel /ruang kelas SMA; Rasio siswa/guru SD; Rasio siswa/guru SMP; Rasio siswa/guru SMA. | | | | | | | |
| | • Guru | Presentase guru SD kualifikasi; Presentase guru SMP kualifikasi; Presentase guru SMA kualifikasi. | | | | | | | |
| | • Sekolah | Presentase kerusakaan ruang kelas SD; Presentase kerusakaan ruang kelas SMP; Presentase kerusakaan ruang kelas SMA. | | | | | | | |
| Aksesibilitas | Jarak layananInfrastruktur | Rata-rata jarak SD/SMP/SMA;Desa beraspal. | | | | | | | |
| Keterjangkauan | • Blaya | Rata-rata pengeluaran keluarga untuk pendidikan per bulan. | | | | | | | |
| Keberlanjutan | • Layanan pendidikan | Angka Partisipasi Murid SD/SMP/SMA; | | | | | | | |
| Stablitas | • Resiko bencana | Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota. | | | | | | | |

Hasil Analisis Tematik Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara

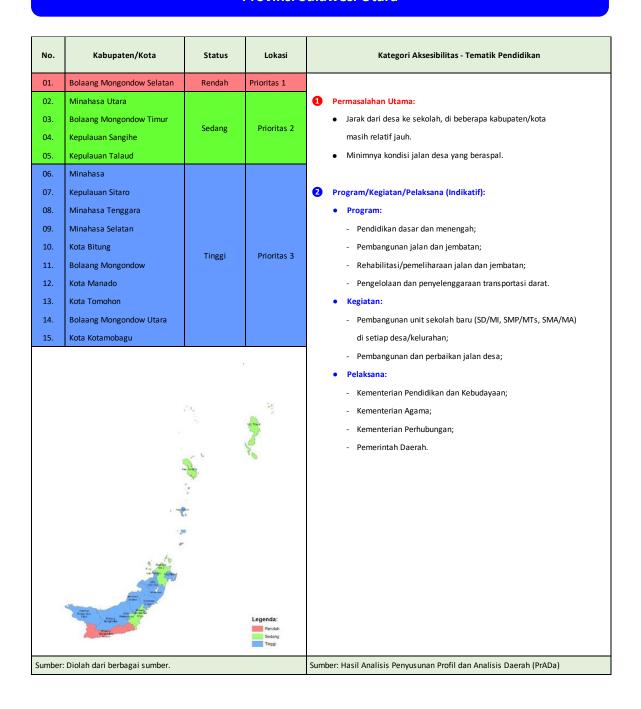


| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Tematik Pendidikan |
|-------------------|---|--------|-------------|--|
| 01. 02. | Minahasa Utara Bolaang Mongondow Timur | | | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK |
| 03. 04. | Minahasa Bolaang Mongondow Selatan | Rendah | Prioritas 1 | PENDIDIKAN |
| 05. | Kepulauan Sangihe | | | KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI |
| 06. 07. | Kepulauan Sitaro Minahasa Tenggara | | | SULAWESI UTARA |
| 08. 09. 10. | Kota Bitung Bolaang Mongondow Kota Manado | Sedang | Prioritas 2 | DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, |
| 11. 12. | Kota Tomohon Kota Kotamobagu | | | RELATIF |
| 13. 14. | Minahasa Selatan Bolaang Mongondow Utara | Tinggi | Prioritas 3 | SEDANG HINGGA RENDAH |
| 15. | Kepulauan Talaud | | | RENDAH : 5 KABUPATEN/KOTA |
| | | | | SEDANG : 7 KABUPATEN/KOTA |
| | | | | TINGGI : 3 KABUPATEN/KOTA |
| Sumber: | Diolah dari berbagai sumber. | | | Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |

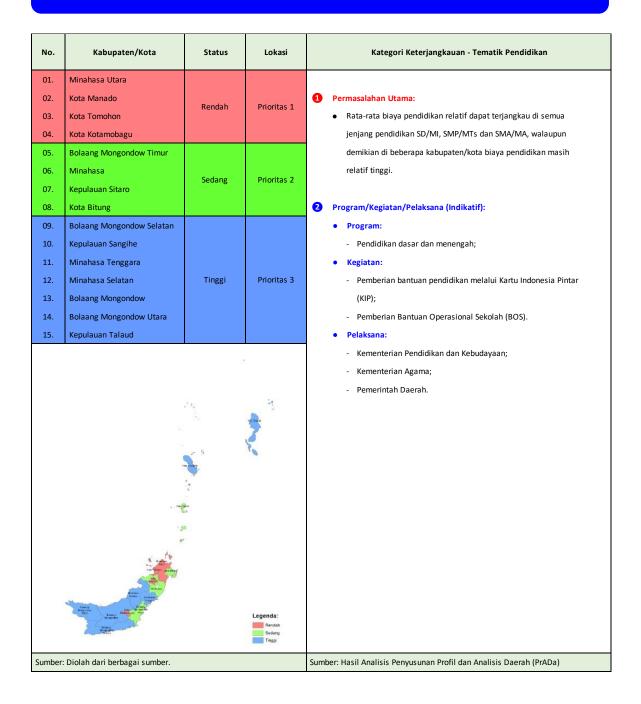
Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara

| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Kategori Ketersediaan - Tematik Pendidikan |
|--|--|--------|-------------|---|
| 01. 02. | Bolaang Mongondow Kota Kotamobagu | Rendah | Prioritas 1 | 1 Permasalahan Utama: |
| 03. 04. 05. 06. 07. 08. | Minahasa Utara Bolaang Mongondow Timur Minahasa Bolaang Mongondow Selatan Kepulauan Sangihe Kota Bitung Kepulauan Talaud | Sedang | Prioritas 2 | Masih terbatasnya jumlah ruang kelas di beberapa kabupaten/ kota untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA untuk seluruh rombongan belajar; Tingkat kerusakan ruang kelas relatif tinggi di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA; Rasio siswa/guru relatif masih belum mencukupi di semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA di beberapa |
| 10. 11. 12. 13. 14. | 10. Kepulauan Sitaro 11. Minahasa Tenggara 12. Minahasa Selatan 13. Kota Manado 14. Kota Tomohon | | | kabupaten/kota; Kualifikasi guru minimal sarjana relatif sudah mencukupi, untuk semua jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA. Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: |
| 13. Bulading Muliguliuuw Utala | | | * | Pendidikan dasar dan menengah; Peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan. Kegiatan: Pembangunan unit sekolah baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA); Pembangunan Ruang Kelas Baru (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA); Rehabilitasi ruang belajar; Renovasi sekolah; Perekrutan guru PNS; Pemberian beasiswa bagi guru; Sertifikasi guru; Peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Pelaksana: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; |
| b | Legenda: Rendah Sedang Triggi | | | - Kemen PAN RB; - Pemerintah Daerah. |
| Sumber: | Diolah dari berbagai sumber. | | | Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |

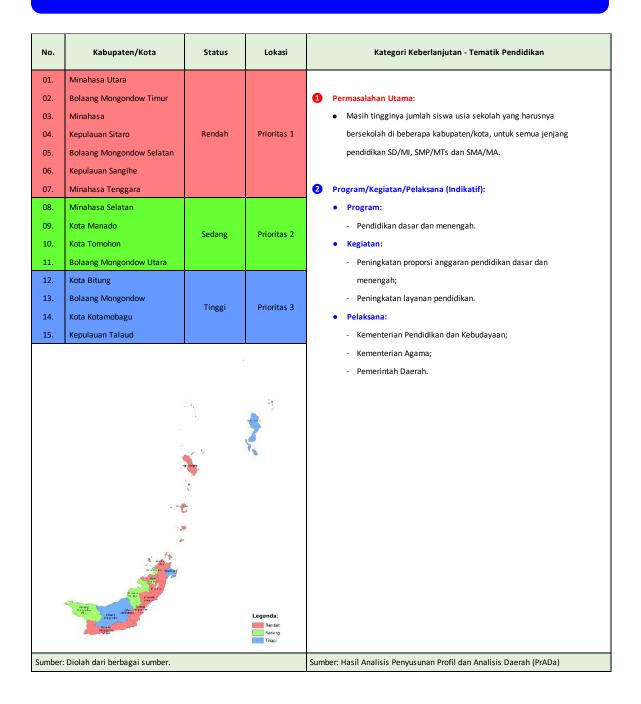
Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara



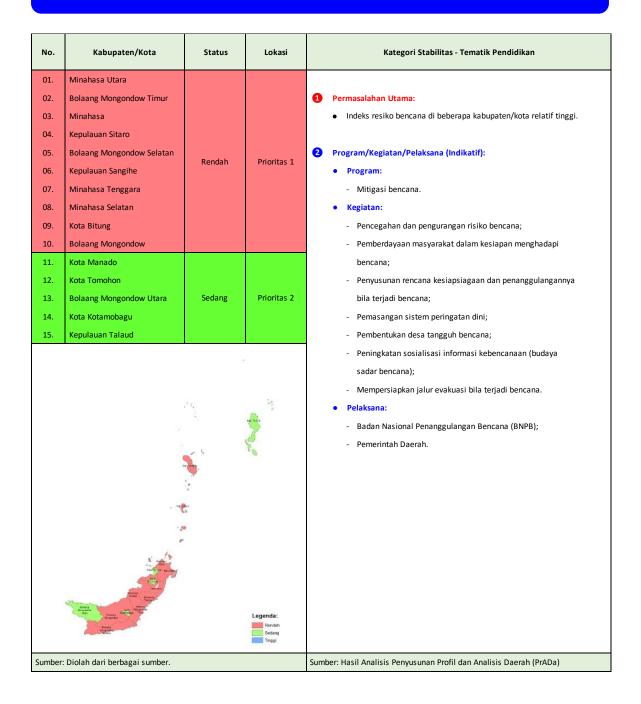
Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara



Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara



Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara





Tematik:

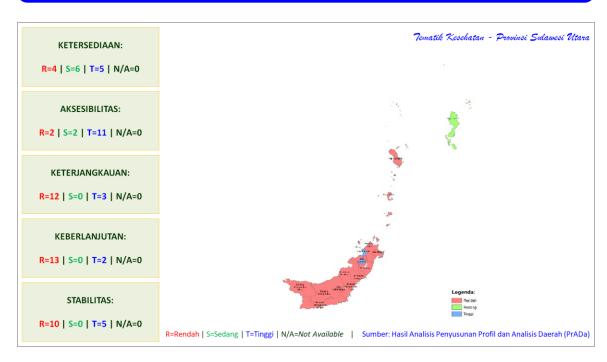
Kesehatan

Provinsi Sulawesi Utara



| Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| Kategori | Komponen | Indikator | | | | | | | |
| Ketersediaan | • Tenaga Kesehatan | Rasio bidan per 100.000 penduduk; Rasio dokter per 100.000 penduduk; Rasio tenaga kesehatan lain per 100.000 penduduk. | | | | | | | |
| | • Sarana Kesehatan | Rasio posyandu per 3.000 penduduk; Rasio puskesmas per 120.000 penduduk; Rasio puskesmas pembantu per 3.000 penduduk; Rasio rumah sakit per 240.000 penduduk. | | | | | | | |
| Aksesibilitas | Kedekatan dengan fasilitas kesehatan terdekat | Jarak ke puskesmas rawat inap; Jarak ke puskesmas tanpa rawat inap; Jarak ke puskesmas pembantu; Jarak ke rumah sakit; Jarak ke puskesmas praktik dokter. | | | | | | | |
| Keterjangkauan | Kepemilikan BPJS kesehatan | Presentase kepemilikan BPJS kesehatan. | | | | | | | |
| Keberlanjutan Penunjang ketersediaan tenaga kesehatan pada masa mendatang | | Keberadaan perguruan tinggi di daerah yang memiliki jurusan dibidang kesehatan. | | | | | | | |
| Stablitas | Resiko bencana | Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota. | | | | | | | |

Hasil Analisis Tematik Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara

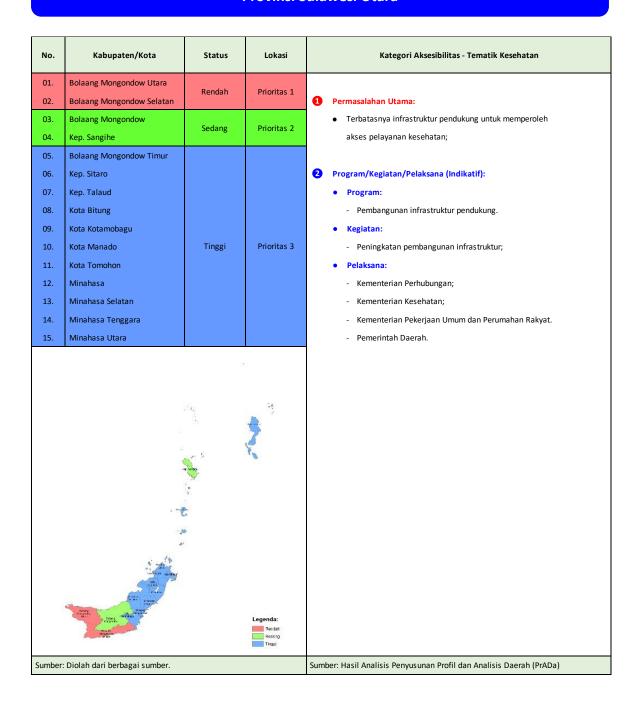


| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Tematik Kesehatan | | | |
|--------|------------------------------|--------|-------------|--|--|--|--|
| 01. | Bolaang Mongondow | | | | | | |
| 02. | Bolaang Mongondow Timur | | | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK | | | |
| 03. | Bolaang Mongondow Utara | | | KESEHATAN | | | |
| 04. | Bolaang Mongondow Selatan | | | REJETIATAN | | | |
| 05. | Kep. Sangihe | | | KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI | | | |
| 06. | Kep. Sitaro | Rendah | Prioritas 1 | SULAWESI UTARA | | | |
| 07. | Kota Bitung | Kendan | Prioritas I | SOLAWESI OTAKA | | | |
| 08. | Kota Kotamobagu | | | DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI | | | |
| 09. | Minahasa | | | KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, | | | |
| 10. | Minahasa Selatan | | | KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, | | | |
| 11. | Minahasa Tenggara | | | RELATIF | | | |
| 12. | Minahasa Utara | | | RENDAH | | | |
| 13. | Kep. Talaud | Sedang | Prioritas 2 | KLINDAII | | | |
| 14. | Kota Manado | Tinggi | Prioritas 3 | | | | |
| 15. | Kota Tomohon | 66. | T Horitas 5 | RENDAH : 12 KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | | MINDAII . 12 IMBOPATEN/NOTE | | | |
| | | | | SEDANG : 1 KABUPATEN/KOTA | | | |
| | | | | TINGGI : 2 KABUPATEN/KOTA | | | |
| Sumber | Diolah dari berbagai sumber. | | | Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) | | | |

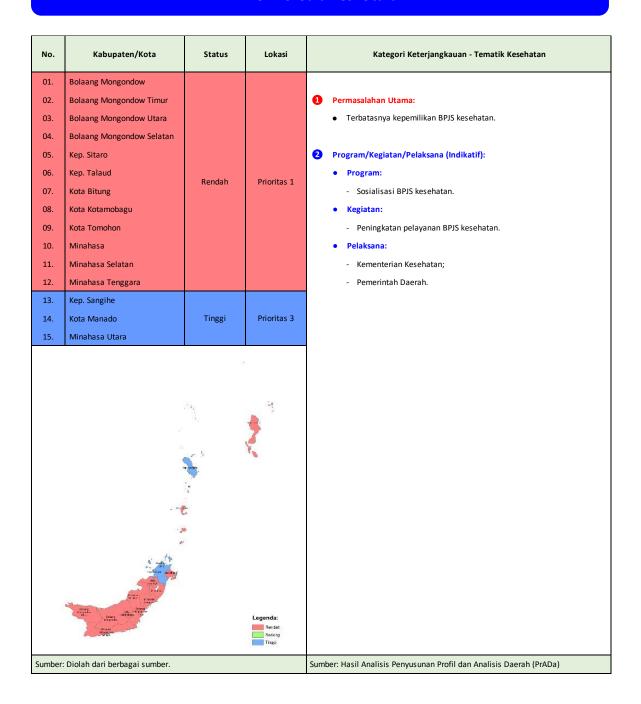
Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara

| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Kategori Ketersediaan - Tematik Kesehatan |
|--|--|--------------------------------|---------------------------------------|--|
| No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. | Kabupaten/Kota Kota Bitung Kota Kotamobagu Kota Manado Minahasa Utara Bolaang Mongondow Timur Bolaang Mongondow Utara Minahasa Minahasa Selatan Minahasa Tenggara Bolaang Mongondow Selatan Kep. Sangihe Kep. Sitaro Kep. Talaud Kota Tomohon | Status Rendah Sedang Tinggi | Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 | Permasalahan Utama: Terbatasnya jumlah tenaga dokter, perawat dan bidan; Belum meratanya penempatan dokter; Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan di daerah pedalaman, perbatasan dan terpencil; Masih minimnya, kuantitas serta kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan. Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: Peningkatan pelayanan kesehatan. Kegiatan: Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan; |
| Sumborn | Diolah dari berbagai sumber. | | Legenda: Reviati Beachy Trappi | Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan jaringannya. Pelaksana: Kementerian Kesehatan; Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; Pemerintah Daerah. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |

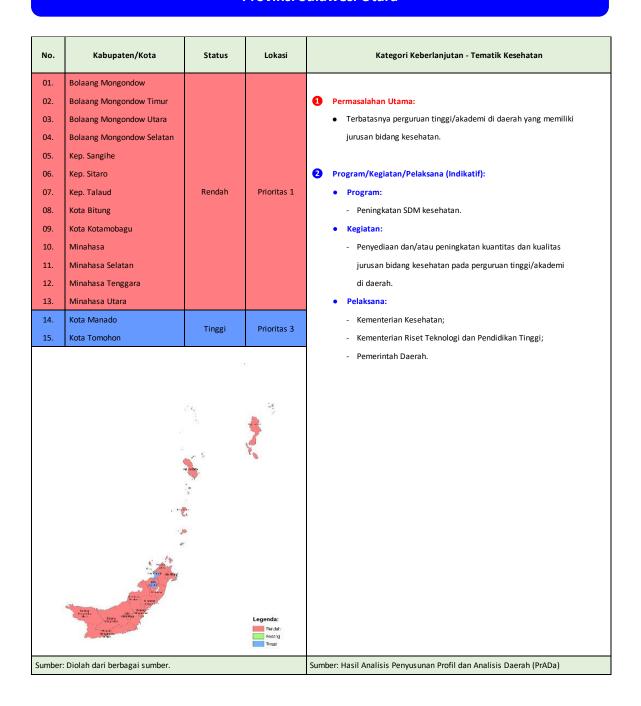
Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara



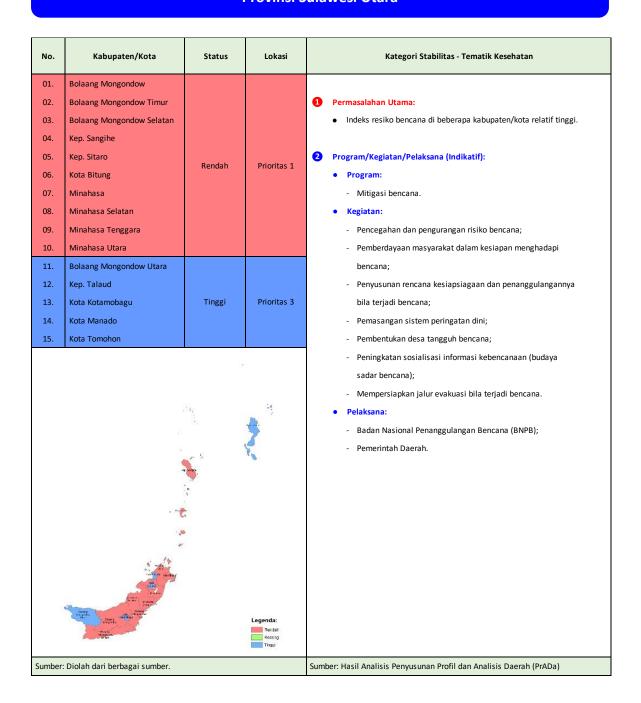
Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara

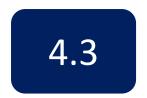


Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Kesehatan **Provinsi Sulawesi Utara**



Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara





Tematik:

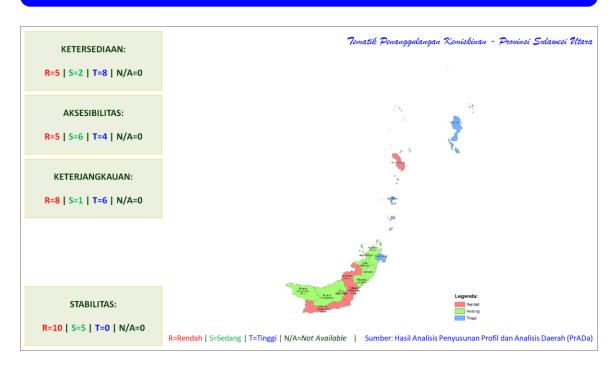
Penanggulangan Kemiskinan

Provinsi Sulawesi Utara



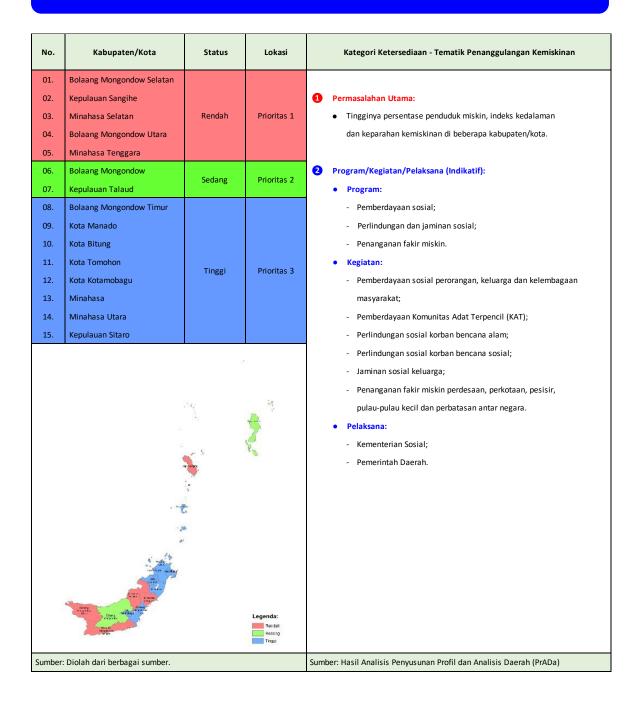
| Lingkup dan Va | Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara | | | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|
| Kategori | Komponen | Indikator | | | | | |
| Ketersediaan | • Penduduk miskin | Presentase kemiskinan (P0); Indeks kedalaman kemiskinan (P1); Indeks keparahan kemiskinan (P2). | | | | | |
| Aksesibilitas | • Pelayanan dasar | Presentase jumlah anak miskin yang bersekolah; Presentase individu miskin yang memiliki penyakit kronis; Presentase Rumah Tangga Miskin (RTM) yang memiliki rumah milik sendiri atau kontrak/sewa; Presentase RTM yang menggunakan air minum layak; Presentase RTM yang menggunakan jamban sendiri/bersama; Presentase RTM yang menggunakan penerangan listrik (PLN dan non PLN); Kondisi jalan mantab. | | | | | |
| Keterjangkauan | • Luas Layanan | Realisasi Program Keluarga Harapan (PKH); Target PKH; Presentase penerima PKH. | | | | | |
| Stablitas | Resiko bencana | Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota. | | | | | |

Hasil Analisis Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara



| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Tematik Penanggulangan Kemiskinan |
|-------------------|---|--------|-------------|---|
| 01. 02. 03. | Bolaang Mongondow Timur Bolaang Mongondow Selatan Kepulauan Sangihe | Rendah | Prioritas 1 | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK PENANGGULANGAN KEMISKINAN |
| 04. 05. | Minahasa Selatan Bolaang Mongondow | | | KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI |
| 06. 07. | Kota Manado Kota Tomohon | Sedang | | SULAWESI UTARA |
| 08. 09. | Kota Kotamobagu Minahasa | | Prioritas 2 | DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, |
| 10. 11. | Minahasa Utara Bolaang Mongondow Utara | | | KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF |
| 12. 13. | Minahasa Tenggara Kota Bitung | | | SEDANG |
| 14. | Kepulauan Talaud | Tinggi | Prioritas 3 | |
| 15. | Kepulauan Sitaro | | | RENDAH : 4 KABUPATEN/KOTA |
| | | | | SEDANG : 8 KABUPATEN/KOTA |
| | | | | TINGGI : 3 KABUPATEN/KOTA |
| Sumber: | Diolah dari berbagai sumber. | | | Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |

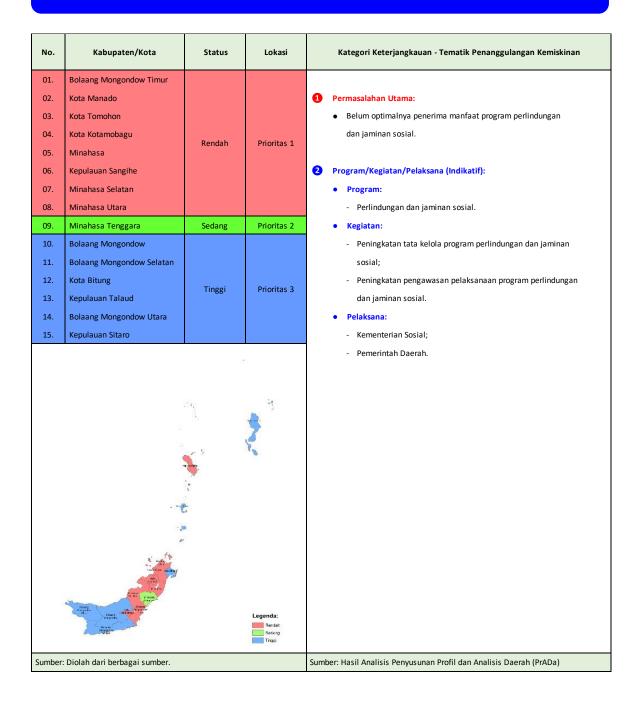
Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara



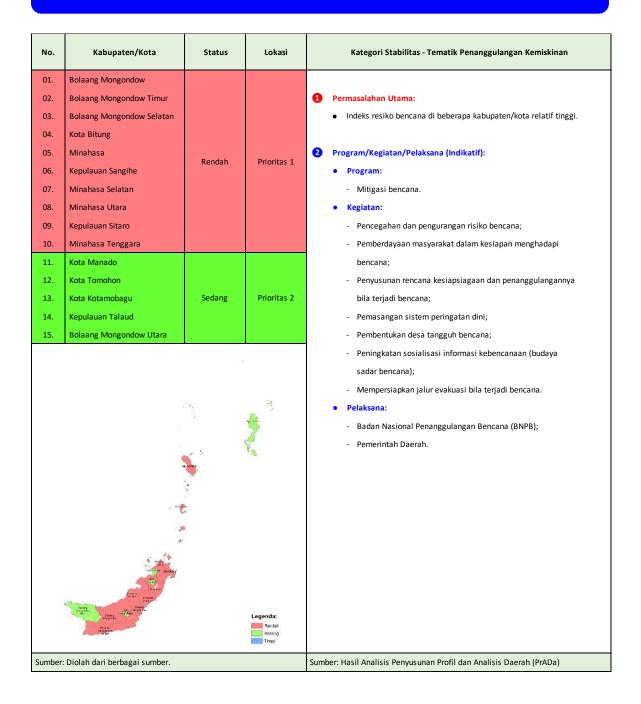
Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara

| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Kategori Aksesibilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan |
|---------------------------------|--|--------|---------------------------|---|
| 01. 02. 03. 04. | Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow Timur Bolaang Mongondow Selatan Kepulauan Sangihe Bolaang Mongondow Utara | Rendah | Prioritas 1 | Permasalahan Utama: Akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar masih perlu ditingkatkan, di beberapa kabupaten/kota. |
| 06. 07. 08. 09. 10. | Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu Minahasa Utara Kepulauan Sitaro | Sedang | Prioritas 2 | Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: Pendidikan dasar dan menengah; Penguatan pelaksanaan jaminan kesehatan nasional; Pembinaan pelayanan kesehatan; Pembinaan dan pengembangan infrastruktur permukiman; |
| 12. 13. 14. 15. | Minahasa Kepulauan Talaud Minahasa Selatan Minahasa Tenggara | Tinggi | Prioritas 3 | Pengembangan perumahan; Peningkatan layanan ketenagalistrikan. Kegiatan: Pemberian bantuan pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar |
| | The state of the s | | Legenda: Redah Sebag Trap | (KIP); Pengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS); Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan; Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Pembangunan rumah susun; Penyediaan sanitasi layak; Peningkatan listrik desa. Pelaksana: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; Kementerian Agama; Kementerian Kesehatan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) - Persero; Pemerintah Daerah. |

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara



Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara





Tematik:

Perumahan dan Permukiman

Provinsi Sulawesi Utara

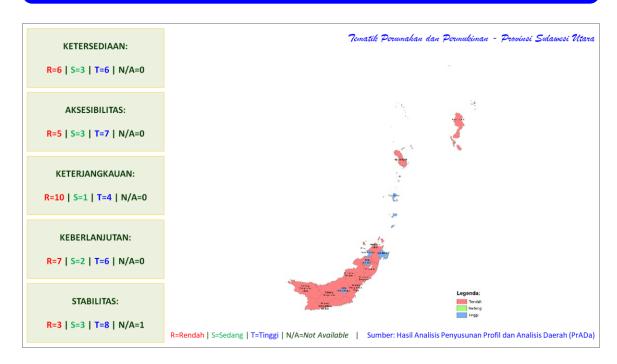


| Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara | | | | | | | |
|---|----------------|---|--|--|--|--|--|
| Kategori | Komponen | Indikator | | | | | |
| Ketersediaan | • Persampahan | Tempat buang sampah sebagian besar keluarga; Tempat penampungan sampah sementara (TPS). | | | | | |
| | • Ruang publik | Keberadaan ruang publik bagi warga untuk bersantai atau bermain tanpa perlu membayar. | | | | | |
| | Angkutan umum | Keberadaan angkutan umum yang melewati desa atau kelurahan; Operasional angkutan umum yang melewati desa atau kelurahan; Jam operasi angkutan umum yang melewati desa atau kelurahan. | | | | | |
| | Telekomunikasi | Keberadaan telepon koin dan kartu yang masih aktif atau berfungsi; Keberadaan base transceiver station (BTS) atau menara telepon seluler; Kondisi sinyal telepon seluler atau handphone. | | | | | |
| | Jasa ekspedidi | Keberadaan warung internet (warnet) di desa atau kelurahan; kantor pos, pos pembantu, rumah pos; Keberadaan pelayanan pos keliling; Keberadaan perusahaan jasa ekspedisi swasta. | | | | | |
| | Pertokoan | Keberadaan kelompok pertokoan. | | | | | |
| | • Keamanan | Keberadaan pos polisi termasuk kantor polisi. | | | | | |

| Lingkup dan Va | Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara | | | | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Kategori | Komponen | Indikator | | | | | |
| Aksesibilitas | Akses ke sumber air untuk minum | Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk minum; Jarak tempat pembuangan limbah, kotoran, tinja dengan sumber air untuk minum. | | | | | |
| | Akses ke sumber air untuk memasak | Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk memasak; Jarak tempat pembuangan limbah, kotoran, tinja dengan sumber air untuk memasak. | | | | | |
| | Akses ke sumber air untuk mandi, cuci, dll. | Sumber air utama yang digunakan rumah tangga untuk mandi, cuci, dll; Jarak tempat pembuangan limbah, kotoran, tinja dengan sumber air untuk mandi, cuci, dll. | | | | | |
| | • Sanitasi | Fasilitas tempat buang air besar, dan siapa saja yang menggunakan; Jenis jamban, kloset yang digunakan rumah tangga; Lokasi tempat pembuangan akhir tinja. | | | | | |
| Keterjangkauan | • Komunikasi | Keluarga yang berlangganan telepon kabel. | | | | | |
| | Status rumah | Status kepemilikan bangunan tempat tinggal yang ditempati. | | | | | |
| | • Kondisi rumah | Bahan bangunan utama atap rumah terluas; Bahan bangunan utama dinding rumah terluas; Bahan bangunan utama lantai rumah terluas. | | | | | |

| Lingkup dan Va | Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--|
| Kategori | Komponen | Indikator | | | | |
| | Air isi ulang | Cara memperoleh air minum yang bersumber dari air kemasan bermerk, air isi ulang dan leding eceran. | | | | |
| | Perpipahan | Sumber air minum, mandi, cuci, memasak menggunakan perpipiaan atau hidran umum. | | | | |
| | Penerangan | Sumber penerangan utama rumah. | | | | |
| | Energi memasak | Jenis bahan bakar utama yang digunakan untuk memasak. | | | | |
| Keberlanjutan | • Limbah | Keberadaan permukiman di bantaran sungai; Pembuangan limbah pabrik, industri, usaha ke sungai. | | | | |
| | Wilayah sutet | Keberadaan wilayah desa atau kelurahan yang dilalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (sutet). | | | | |
| | Permukiman kumuh | Keberadaan permukiman kumuh di desa atau kelurahan. | | | | |
| | Modal sosial | Keberadaan kebiasaan gotong royong warga di desa atau kelurahan. | | | | |
| Stabilitas | Mitigasi bencana | Keberadaan sistem peringatan dini bencana alam di desa atau kelurahan; Keberadaan perlengkapan keselamatan jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan; Keberadaan jalur evakuasi jika terjadi bencana alam di desa atau kelurahan. | | | | |

Hasil Analisis Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara



| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Tematik Perumahan dan Permukiman |
|---|---|--------|-------------|--|
| 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. | Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow Selatan Bolaang Mongondow Timur Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaud Minahasa Minahasa Selatan Minahasa Tenggara Minahasa Utara | Rendah | Prioritas 1 | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI UTARA DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, |
| 11. 12. 13. 14. | Kepulauan Sitaro Kota Bitung Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon | Tinggi | Prioritas 3 | RENDAH |
| | Diolah dari berbagai sumber. | | | RENDAH : 10 KABUPATEN/KOTA SEDANG : - KABUPATEN/KOTA TINGGI : 5 KABUPATEN/KOTA Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara

| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Kategori Ketersediaan - Tematik Perumahan dan Permukiman |
|---------------------------------|---|--------|---------------------------------|--|
| 01. 02. 03. 04. 05. | Bolaang Mongondow Selatan Bolaang Mongondow Timur Kepulauan Sangihe Kepulauan Sitaro Kepulauan Talaud Minahasa Tenggara | Rendah | Prioritas 1 | Permasalahan Utama: Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke dalam lubang, sungai, saluran irigasi, danau, laut, got dan selokan; Terbatasnya ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS); Masih minimnya ketersediaan prasarana dan sarana pendukung |
| 07. 08. 09. | Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow Utara Minahasa Selatan | Sedang | Prioritas 2 | kawasan perumahan dan permukiman untuk keperluan transportasi publik, telekomunikasi, ekspedisi, pertokoan/pasar, serta peningkatan keamanan di desa/kelurahan. |
| 10. 11. 12. 13. 14. | Minahasa Minahasa Utara Kota Bitung Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon | Tinggi | Prioritas 3 | Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: Peningkatan fasilitas pendukung kawasan perumahan dan dan permukiman. Kegiatan: |
| | | | Legenda: Oerdah Sedeng Toggs | Sosialisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, recycle); Penyediaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); Penyediaan prasarana dan sarana untuk keperluan transportasi publik, telekomunikasi, ekspedisi, pertokoan/pasar, serta peningkatan keamanan di desa/kelurahan. Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Pemerintah Daerah. |

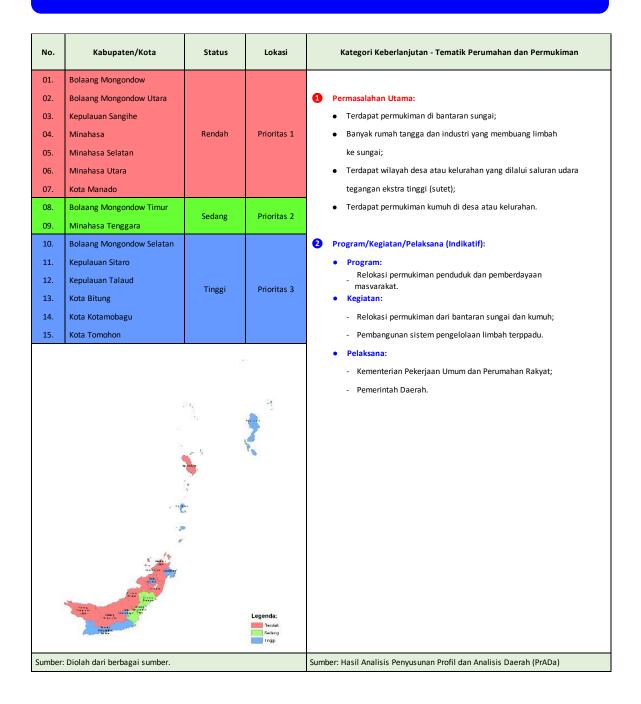
Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara

| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Kategori Aksesibilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman |
|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|
| 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. | Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow Selatan Bolaang Mongondow Timur Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Talaud Minahasa Minahasa Selatan Kota Bitung Kepulauan Sangihe Kepulauan Sitaro Minahasa Tenggara Minahasa Utara Kota Kotamobagu | Rendah Sedang Tinggi | Prioritas 1 Prioritas 2 Prioritas 3 | Permasalahan Utama: Masih banyak rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air minum utama yang berasal dari (1) sumur bor/pompa, mata air terlindung, yang jaraknya kurang dari 10 meter; (2) mata air tak terlindung, air permukaan (sungai/danau/waduk/kolam/irigasi); Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menggunakan fasilitas buang air besar, karena faktor sosial budaya, atau dikarenakan tidak adanya fasilitas tempat buang air besar; Terbatasnya lokasi pembuangan akhir tinja yang menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), dan akhirnya di buang ke kolam/sawah/sungai/danau/laut, lubang tanah, pantai/tanah lapang/kebun, dan lainnya. |
| 14. | Kota Manado Kota Tomohon | | | Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: Peningkatan akses ke sumber air untuk minum dan sanitasi layak. Kegiatan: Peningkatan akses sumber air untuk minum bagi rumah tangga yang berasal dari leding; Optimalisasi ketersediaan air baku; Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM); Meningkatkan pelayanan kepada rumah tangga dengan sistem pengelolaan air limbah terpusat; Membangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal; |
| Sumber: | Legenda: Proddh Festany Irage Irage Irage | | | - Meningkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT). • Pelaksana: - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; - Kementerian Kesehatan; - BUMN/BUMD; - Pemerintah Daerah. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara

| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Kategori Keterjangkauan - Tematik Perumahan dan Permukiman |
|---|--|--------|---------------------------------------|---|
| 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. | Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow Selatan Bolaang Mongondow Timur Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Sangihe Kepulauan Sitaro Kepulauan Talaud Minahasa Minahasa Selatan Minahasa Tenggara | Rendah | Prioritas 1 | Permasalahan Utama: Rendahnya kualitas bangunan rumah sebagai tempat perlindungan dari panas dan hujan, seperti (1) bahan bangunan utama atap rumah terluas berasal dari asbes, seng, bambu, kayu/ sirap, jerami/ijuk/daun-daunan/rumbia, dan lainnya; (2) bahan bangunan utama dinding rumah terluas berasal dari plesteran anyaman bambu / kawat, kayu, anyaman bambu, batang kayu, dan bambu; (3) bahan bangunan utama lantai rumah terluas berasal dari bambu, kayu / papan kualitas rendah, tanah, dan lainnya; |
| 11. 12. | Minahasa Utara Kota Bitung | Sedang | Prioritas 2 | Masih terbatasnya rumah tangga yang menggunakan sumber air untuk minum, memasak, mandi dan cuci, berasal dari perpipahan |
| 13. 14. 15. | Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon | Tinggi | Prioritas 3 | atau hidran umum; Masih terbatasnya rumah tangga yang menggunakan penerangan utama rumah berasal dari listrik; |
| Legenda: | | | Leganda | utamanya berasal dari kayu bakar. Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: Bantuan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kegiatan: Menyediakan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; Memperluas jaringan distribusi air bersih bagi rumah tangga; Subsidi listrik bagi masyarakat berpenghasilan rendah; Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga. Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; |
| Sumber: | Diolah dari berbagai sumber. | | Legenda; Rendah Sedang Inggi | - Pemerintah Daerah. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |

Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara



Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara

| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Kategori Stabilitas - Tematik Perumahan dan Permukiman |
|---------|------------------------------|--------|----------------------------------|---|
| 01. | Kota Kotamobagu | N/A | | |
| 02. | Bolaang Mongondow | | | 1 Permasalahan Utama: |
| 03. | Bolaang Mongondow Utara | Rendah | Prioritas 1 | Minimnya keberadaan sistem peringatan dini bencana alam |
| 04. | Minahasa Utara | | | di desa atau kelurahan; |
| 05. | Bolaang Mongondow Selatan | | | Minimnya keberadaan perlengkapan keselamatan jika terjadi |
| 06. | Minahasa | Sedang | Prioritas 2 | bencana alam di desa atau kelurahan; |
| 07. | Minahasa Selatan | | | Minimnya keberadaan jalur evakuasi jika terjadi bencana alam |
| 08. | Bolaang Mongondow Timur | | | di desa atau kelurahan. |
| 09. | Kepulauan Sangihe | | | |
| 10. | Kepulauan Sitaro | | | 2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): |
| 11. | Kepulauan Talaud | Tinnet | Dui autho a 2 | Program: |
| 12. | Minahasa Tenggara | Tinggi | Prioritas 3 | - Mitigasi bencana. |
| 13. | Kota Bitung | | | Kegiatan: |
| 14. | Kota Manado | | | - Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; |
| 15. | Kota Tomohon | | | - Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi |
| | | | | bencana; Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; Pemasangan sistem peringatan dini; Pembentukan desa tangguh bencana; Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Pemerintah Daerah. |
| Sumber: | Diolah dari berbagai sumber. | | Legenda: Perdah Sealang Inggi | Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |



Tematik:

Ketahanan Pangan

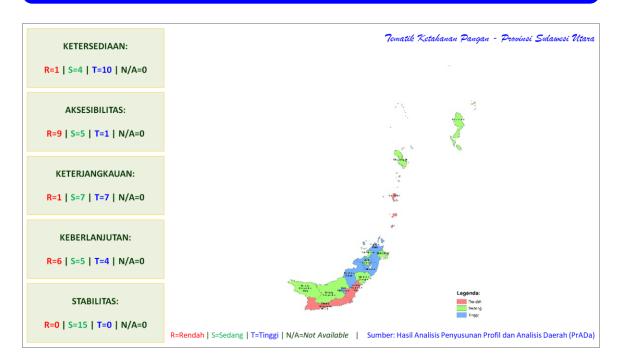
Provinsi Sulawesi Utara



| Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|
| Kategori | Komponen | Indikator | | | | |
| • Ketersediaan | Produktivitas pangan | Produktivitas padi sawah; Produktivitas padi ladang; Produktivitas jagung; Produktivitas kacang hijau; Produktivitas kacang tanah; Produktivitas kedelai; Produktivitas ubi kayu; Produktivitas ubi jalar. | | | | |
| | Produksi perikanan | Produksi perikanan tangkap;Produksi perikanan budidaya. | | | | |
| | Produksi peternakan | Produksi unggas;Produksi ternak. | | | | |
| | Konsumsi serealia | Konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih serealia. | | | | |
| | • Lahan irigasi | Rasio luas lahan sawah, tegal/kebun, ladang/huma terhadap luas wilayah; Rasio luas sawah irigasi dibandingkan luas total sawah. | | | | |
| Aksesibilitas | • Infrastruktur | Indeks kepadatan jalan;Jalan mantab; | | | | |
| | • Akses ke pasar | Rasio desa dengan bangunan pasar permanen/semi permanen; Rata-rata perkiraan jarak ke pasar dengan bangunan permenen/semi permanen terdekat. | | | | |

| Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|
| Kategori | Komponen | Indikator | | | |
| • Keterjangkauan | • Kemiksinan | Angka kemiskinan; Indeks kedalaman kemiskinan (P1); Indeks keparahan kemiskinan (P2). | | | |
| | Pengeluaran perkapita | Pengeluaran perkapita. | | | |
| | Kesehatan bayi | Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR);Bayi Gizi Buruk. | | | |
| Keberlanjutan Tenaga kerja | | Rasio rumah tangga tanaman pangan (RTTP); Rasio rumah tangga perikanan budidaya; Rasio rumah tangga perikanan tangkap. | | | |
| | Lahan pertanian | • Rasio luas lahan terhadap RTTP; | | | |
| | Populasi peternakan | Populasi ternak;Populasi unggas. | | | |
| Stablitas | Mitigasi bencana | Kerawanan bencana tanah longsor. | | | |

Hasil Analisis Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara

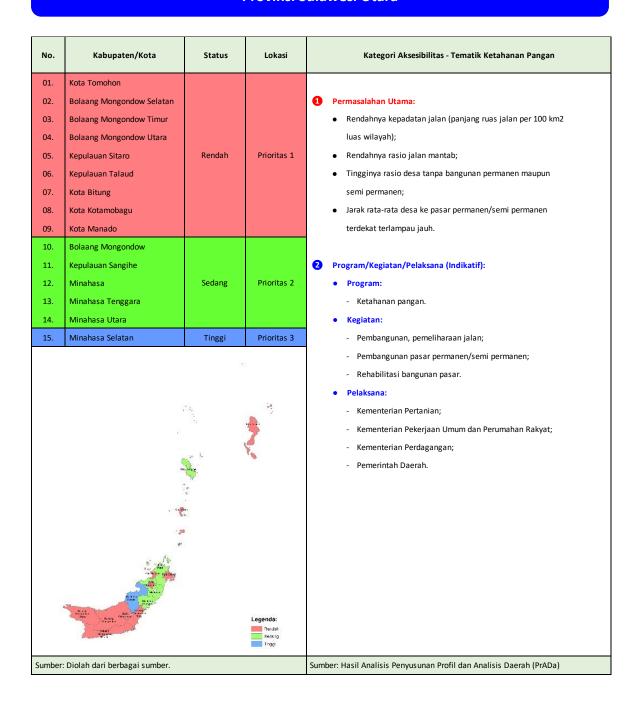


| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Tematik Ketahanan Pangan |
|------------|--|--------|-------------|--|
| 01. 02. | Bolaang Mongondow Selatan Bolaang Mongondow Timur | Rendah | Prioritas 1 | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK |
| 03. 04. | Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Sitaro | | | KETAHANAN PANGAN |
| 05. | Bolaang Mongondow | | Prioritas 2 | KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI |
| 06. 07. | Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaud | Sedang | | SULAWESI UTARA |
| 08. | Kota Bitung | | | DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI |
| 09. | Kota Manado | | | KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, |
| 10. | Kota Tomohon | | | KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, |
| 11. | Minahasa Tenggara | | | RELATIF |
| 12. 13. | Kota Kotamobagu Minahasa | Tinggi | Prioritas 3 | SEDANG |
| 14. | Minahasa Selatan | | | |
| 15. | Minahasa Utara | | | RENDAH : 4 KABUPATEN/KOTA |
| | | | | SEDANG : 7 KABUPATEN/KOTA |
| | | | | TINGGI : 4 KABUPATEN/KOTA |
| Sumber: | Sumber: Diolah dari berbagai sumber. | | | Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |

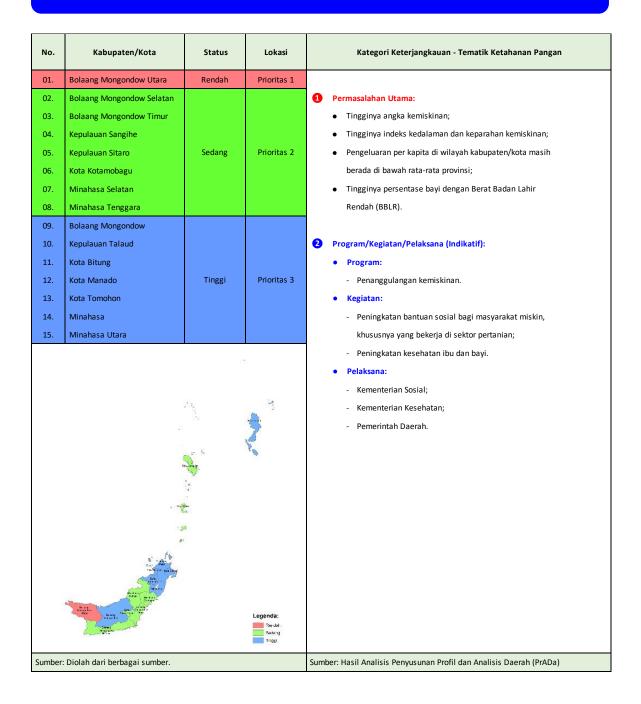
Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara

| 01. Kepulauan Sitaro Rendah Prioritas 1 02. Bolaang Mongondow Selatan Prioritas 2 03. Bolaang Mongondow Timur Sedang Prioritas 2 04. Kepulauan Sangihe Prioritas 2 05. Kepulauan Talaud Rendahnya produksi perikanan tangkap/budidaya; 06. Bolaang Mongondow Utara Rendahnya produksi unggas/ternak; 07. Kota Bitung Konsumsi sereralia lebih tinggi dibandingkan produksi di okabupaten/kota; | • |
|--|----------|
| O3. Bolaang Mongondow Timur O4. Kepulauan Sangihe O5. Kepulauan Talaud O6. Bolaang Mongondow Utara O7. Kota Bitung Prioritas 2 Prioritas 2 Rendahnya produktivitas padi sawah, padi ladang, jagung hijau, kacang tanah, kedelai, ubi kayu, dan ubi jalar; Rendahnya produksi perikanan tangkap/budidaya; Rendahnya produksi unggas/ternak; Konsumsi sereralia lebih tinggi dibandingkan produksi di dangkan produks | • |
| 07. Kota Bitung ■ Konsumsi sereralia lebih tinggi dibandingkan produksi di o | dalam |
| Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon Minahasa Rendahnya persentase luas lahan sawah, tegal/kebun, ladang/huma terhadap luas wilayah; Rendahnya rasio sawah irigasi terhadap luas lahan sawah | h total. |
| 13. Minahasa Selatan 14. Minahasa Tenggara 15. Minahasa Utara Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: Ketahanan pangan. | |
| Regiatan: Peningkatan produksi hasil pertanian; Penerapan teknologi pertanian; Pemberdayaan penyuluh pertanian; Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya perikatan produksi peternakan dan penerapan teknologi peternakan; Peningkatan produksi peternakan dan penerapan teknologi peternakan; Peningkatan ketahanan pangan; Peningkatan ketahanan pangan; Pembukaan sawah dan pembuatan saluran irigasi. Pelaksana: Kementerian Pertanian; Kementerian Relautan dan Perikanan; Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Pemerintah Daerah. | ologi |
| Sumber: Diolah dari berbagai sumber. Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrAD | 12) |

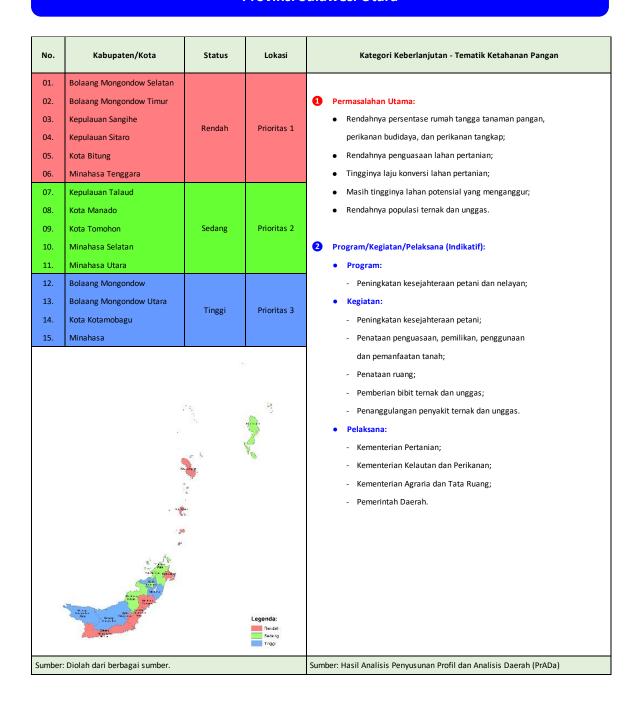
Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara



Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara

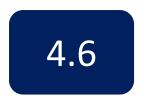


Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Utara



Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Pangan **Provinsi Sulawesi Utara**

| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Pangan |
|---|---|--------|-------------|---|
| 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow Selatan Bolaang Mongondow Timur Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Sangihe Kepulauan Sitaro Kepulauan Talaud Kota Bitung Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon Minahasa Minahasa Selatan Minahasa Utara | Sedang | Prioritas 2 | Permasalahan Utama: Tingginya Kerawanan bencana Tanah longsor. Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: Mitigasi bencana. Kegiatan: Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; Pemasangan sistem peringatan dini; Pembentukan desa tangguh bencana; Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Pemerintah Daerah. |
| Sumber: Diolah dari berbagai sumber. | | | | Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |



Tematik:

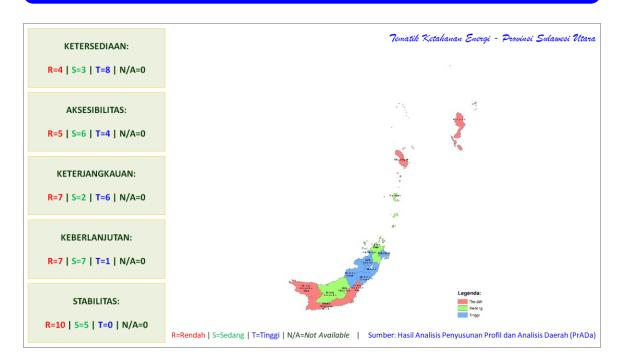
Ketahanan Energi

Provinsi Sulawesi Utara



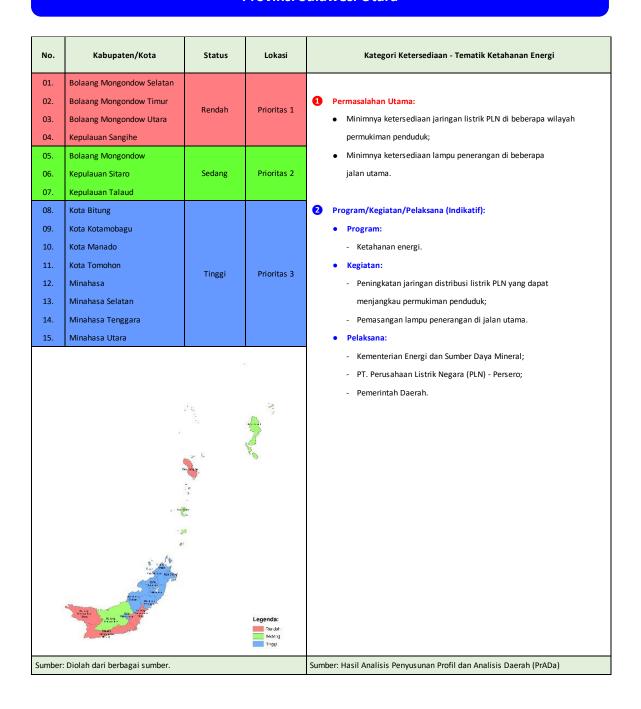
| Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Ketahanan Energi Provinsi Sulawesi Utara | | | | | |
|---|----------|---|--|--|--|
| Kategori | Komponen | Indikator | | | |
| Ketersediaan | | Keluarga pengguna listrik PLN; Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan (listrik diusahakan pemerintah). | | | |
| Aksesibilitas | | Keluarga pengguna listrik PLN; Keluarga pengguna listrik Non PLN; Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan; Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan, listrik diusahakan pemerintah; Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan (listrik diusahakan non pemerintah). | | | |
| Keterjangkauan | | Bahan Bakar untuk memasak yang digunakan sebagian besar keluarga (gas kota, LPG, minyak tanah, kayu bakar); Keluarga tanpa listrik; Tidak ada penerangan di jalan utama desa/kelurahan. | | | |
| ● Keberlanjutan | | Keluarga pengguna listrik PLN Penerangan di jalan utama desa/ kelurahan (listrik diusahakan non pemerintah) | | | |
| Stablitas | | Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota. | | | |

Hasil Analisis Tematik Ketahanan Energi Provinsi Sulawesi Utara

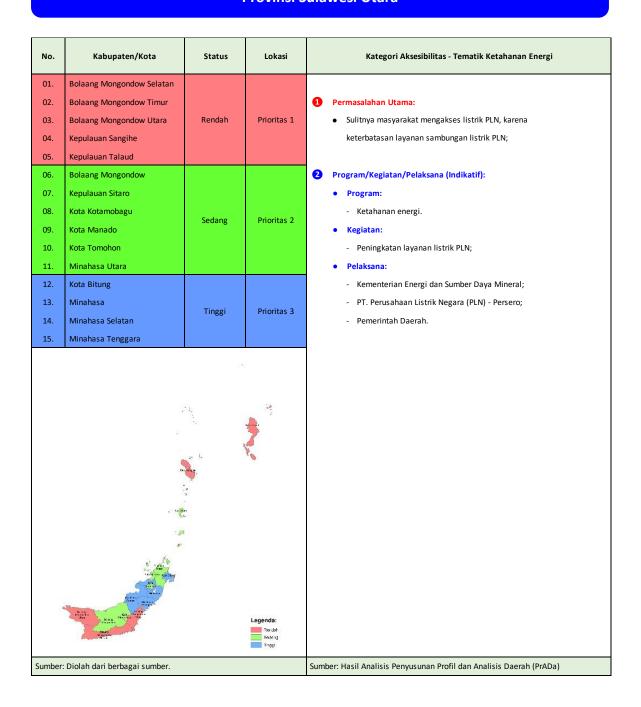


| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Tematik Ketahanan Energi |
|------------|--|--------|-------------|---|
| 01. 02. | Bolaang Mongondow Selatan Bolaang Mongondow Timur | Rendah | Prioritas 1 | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK |
| 03. 04. | Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Sangihe | | | KETAHANAN ENERGI |
| 05. | Kepulauan Talaud | | | KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI |
| 06. 07. | Bolaang Mongondow Kepulauan Sitaro | Sedang | Prioritas 2 | SULAWESI UTARA |
| 08. 09. | Kota Kotamobagu Minahasa Utara | | | DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, |
| 10. 11. | Kota Bitung Kota Manado | Tinggi | Prioritas 3 | KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF |
| 12. 13. | Kota Tomohon Minahasa | | | CUKUP TINGGI |
| 14. 15. | Minahasa Selatan Minahasa Tenggara | | | RENDAH : 5 KABUPATEN/KOTA |
| | | | | SEDANG : 4 KABUPATEN/KOTA |
| | | | | TINGGI : 6 KABUPATEN/KOTA |
| Sumber: | Diolah dari berbagai sumber. | | | Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |

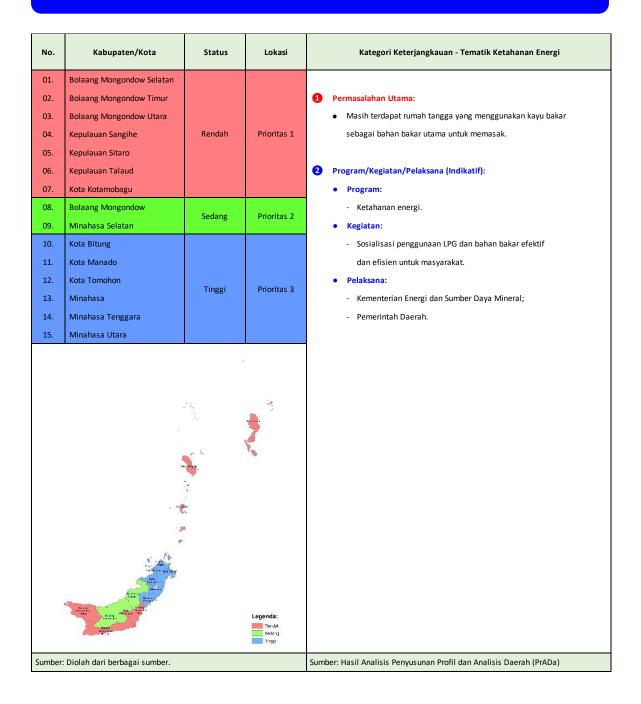
Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Sulawesi Utara



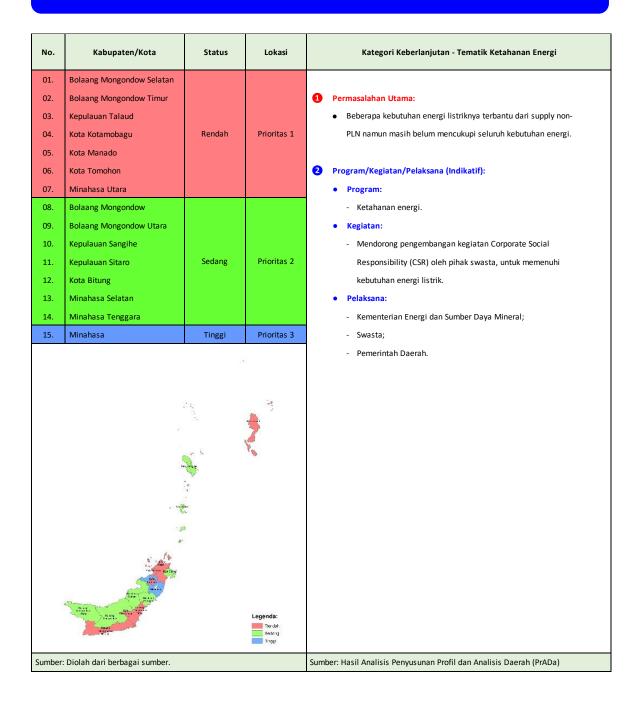
Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Sulawesi Utara



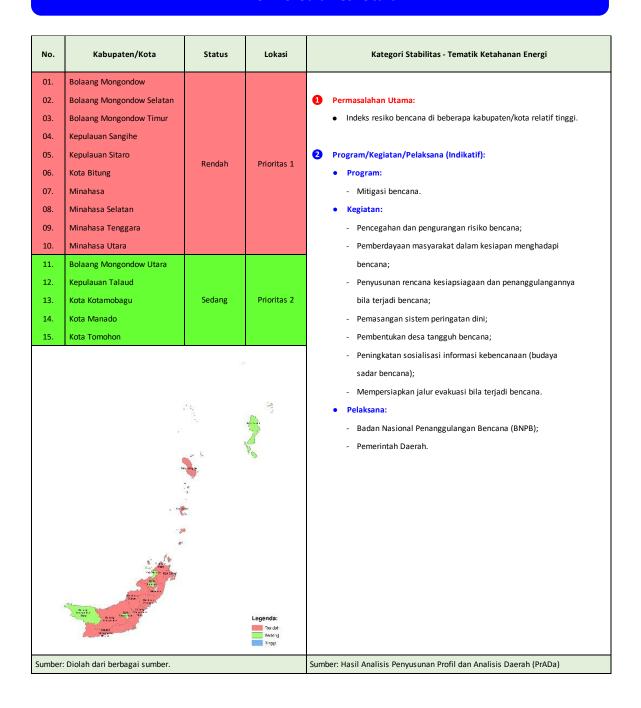
Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Sulawesi Utara

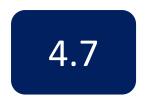


Hasil Analisis Kategori Keberlanjutan - Tematik Ketahanan Energi **Provinsi Sulawesi Utara**



Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Ketahanan Energi Provinsi Sulawesi Utara





Tematik:

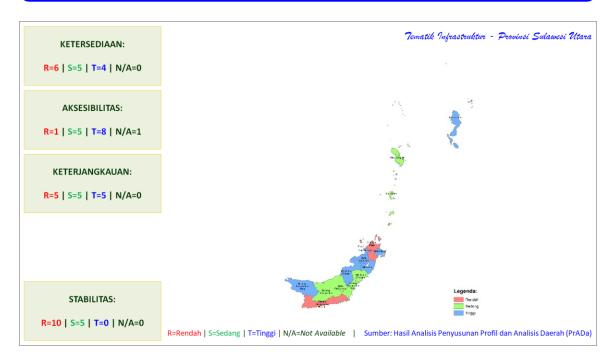
Infrastruktur

Provinsi Sulawesi Utara



| Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara | | | | | | |
|--|----------|--|--|--|--|--|
| Kategori | Komponen | Indikator | | | | |
| Ketersediaan | | Panjang ruas jalan nasional; Panjang ruas jalan provinsi; Rasio irigasi. | | | | |
| Aksesibilitas | | Rasio jalan mantab provinsi. | | | | |
| Keterjangkauan | | Presentase anggaran belanja infrastruktur terhadap dana APBD kabupaten/kota. | | | | |
| Stablitas | | Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) kabupaten/kota. | | | | |

Hasil Analisis Tematik Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara



| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Tematik Infrastruktur |
|---------------------------------|---|----------|-------------|--|
| 01. 02. | Bolaang Mongondow Selatan Minahasa Utara | Rendah | Prioritas 1 | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK |
| 03. 04. | Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow Timur | | | INFRASTRUKTUR |
| 05. | Kepulauan Sitaro | Sedang | Prioritas 2 | KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI |
| 06. 07. 08. | Kepulauan Sangihe Minahasa Tenggara Kota Kotamobagu | Security | Prioritas 2 | SULAWESI UTARA DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI |
| 09. 10. 11. 12. 13. | Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Talaud Minahasa Minahasa Selatan Kota Bitung Kota Manado | Tinggi | Prioritas 3 | KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, RELATIF TINGGI HINGGA SEDANG |
| 15. | Kota Tomohon | | | RENDAH : 2 KABUPATEN/KOTA SEDANG : 6 KABUPATEN/KOTA TINGGI : 7 KABUPATEN/KOTA |
| Sumber: | Diolah dari berbagai sumber. | | | Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |

Hasil Analisis Kategori Ketersediaan - Tematik Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara

| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Kategori Ketersediaan - Tematik Infrastruktur |
|---------------------------------|---|--------|-------------|---|
| 01. 02. 03. 04. 05. | Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Sitaro Kota Bitung Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon | Rendah | Prioritas 1 | Permasalahan Utama: Tingginya persentase jalan dengan permukaan tanah, kerikil dan batuan yang diperkeras; Terbatasnya jaringan telekomunikasi untuk akses informasi, khususnya di perdesaan dan daerah terpencil; |
| 07. 08. 09. 10. | Bolaang Mongondow Selatan Bolaang Mongondow Timur Kepulauan Sangihe Minahasa Tenggara Minahasa Utara | Sedang | Prioritas 2 | Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: Peningkatan kualitas jalan; Peningkatan akses telekomunikasi; |
| 12. 13. 14. 15. | Bolaang Mongondow Kepulauan Talaud Minahasa Minahasa Selatan | Tinggi | Prioritas 3 | Pengembangan transportasi darat/laut. Kegiatan: Peningkatan kualitas jalan beraspal; Pengembangan sistem telekomunikasi; |
| | Total Control of the | | | Penyediaan dan peningkatan prasarana dan sarana penunjang pelabuhan dan dermaga. Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Pemerintah Daerah. |
| Sumber: | Diolah dari berbagai sumber. | | | Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |

Hasil Analisis Kategori Aksesibilitas - Tematik Infrastruktur **Provinsi Sulawesi Utara**

| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Kategori Aksesibilitas - Tematik Infrastruktur |
|---|--|--------|-------------|---|
| 01. | Bolaang Mongondow Selatan | N/A | - | |
| 02. | Kepulauan Talaud | Rendah | Prioritas 1 | 1 Permasalahan Utama: |
| 03. 04. 05. 06. | Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow Utara Minahasa Selatan Minahasa Tenggara Minahasa Utara | Sedang | Prioritas 2 | Waktu tempuh cukup lama karena tekendala beberapa ruas jalan mengalami kerusakan dan belum dilakukan perbaikan; Rendahnya kondisi jalan mantab. 2 Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): |
| 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. | Bolaang Mongondow Timur Kepulauan Sitaro Kepulauan Sangihe Minahasa Kota Bitung Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon | Tinggi | Prioritas 3 | Program: Pembangunan dan pemeliharaan jalan. Kegiatan: Peningkatan kualitas jalan dan perluasan kemantapan jalan beraspal. Pelaksana: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Kementerian Perhubungan; |
| | Total State of the Control of the Co | | | - Pemerintah Daerah. |
| Sumber: | Diolah dari berbagai sumber. | | | Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |

Hasil Analisis Kategori Keterjangkauan - Tematik Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara

| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Kategori Keterjangkauan - Tematik Infrastruktur |
|---------------------------------|--|--------|-------------|---|
| 01. 02. 03. 04. | Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow Timur Kepulauan Sangihe Minahasa Minahasa Utara | Rendah | Prioritas 1 | Permasalahan Utama: Biaya transportasi yang cukup mahal. Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): |
| 05. 06. 07. 08. 09. | Kota Kotamobagu Bolaang Mongondow Selatan Kepulauan Sitaro Minahasa Selatan Minahasa Tenggara | Rendah | Prioritas 2 | Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: Bantuan sosial bagi masyarakat miskin. Kegiatan: Penyediaan transportasi publik bagi masyarakat miskin. Pelaksana: |
| 11. 12. 13. 14. | Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Talaud Kota Bitung Kota Manado Kota Tomohon | Tinggi | Prioritas 3 | Kementerian Sosial; Kementerian Perhubungan; Pemerintah Daerah. |
| | Angel Greek Control of the Control o | | | |
| Sumber: | Diolah dari berbagai sumber. | | | Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |

Hasil Analisis Kategori Stabilitas - Tematik Infrastruktur Provinsi Sulawesi Utara

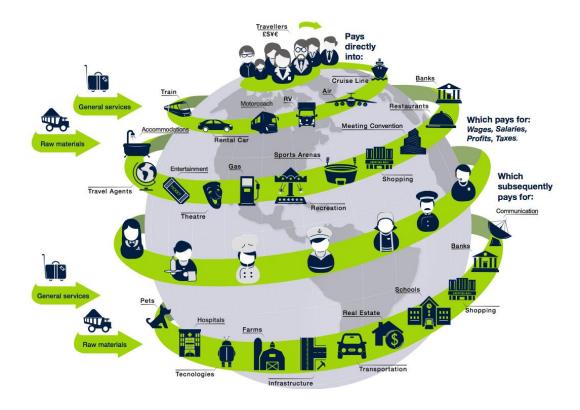
| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Kategori Stabilitas - Tematik Infrastruktur |
|---|---|--------|--------------------------|--|
| No. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. | Kabupaten/Kota Bolaang Mongondow Bolaang Mongondow Selatan Bolaang Mongondow Timur Kepulauan Sitaro Kepulauan Sangihe Minahasa Minahasa Selatan Minahasa Tenggara Minahasa Utara Kota Bitung Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Talaud Kota Kotamobagu Kota Manado Kota Tomohon | Rendah | Prioritas 1 Prioritas 2 | Permasalahan Utama: Indeks resiko bencana di beberapa kabupaten/kota relatif tinggi. Program/Kegiatan/Pelaksana (Indikatif): Program: Mitigasi bencana. Kegiatan: Pencegahan dan pengurangan risiko bencana; Pemberdayaan masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana; Penyusunan rencana kesiapsiagaan dan penanggulangannya bila terjadi bencana; Pemasangan sistem peringatan dini; Pembentukan desa tangguh bencana; Peningkatan sosialisasi informasi kebencanaan (budaya sadar bencana); Mempersiapkan jalur evakuasi bila terjadi bencana. Pelaksana: Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB); Pemerintah Daerah. |
| Sumber | : Diolah dari berbagai sumber. | | | Sumber: Hasil Analisis Penyusunan Profil dan Analisis Daerah (PrADa) |



Tematik:

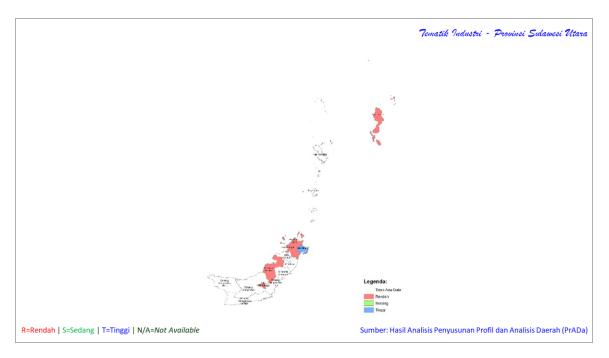
Industri, Pariwisata, dan Sektor Unggulan

Provinsi Sulawesi Utara



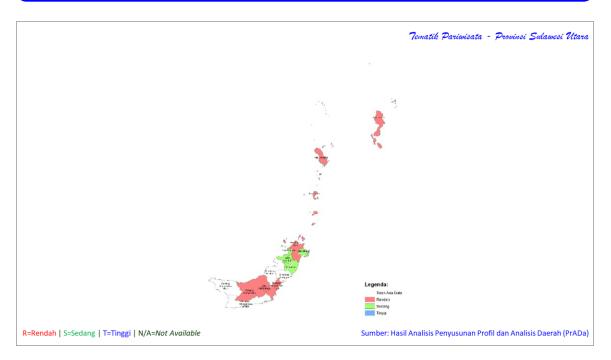
| Lingkup dan Variabel Penyusunan PrADa Tematik Industri dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara | | | | | | |
|--|----------|---|--|--|--|--|
| Kategori | Komponen | Indikator | | | | |
| • Industri | | Jumlah tenaga kerja;Nilai investasi;Nilai produksi. | | | | |
| • Pariwisata | | Akomodasi; Jumlah kamar; Jumlah tempat tidur; Jumlah restoran; Jumlah objek wisata. | | | | |

Hasil Analisis Tematik Industri Provinsi Sulawesi Utara



| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Tematik Industri |
|-----|---------------------------|--------|-------------|--|
| 01. | Bolaang Mongondow | N/A | = | |
| 02. | Bolaang Mongondow Selatan | N/A | - | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK |
| 03. | Bolaang Mongondow Timur | N/A | - | INDUSTRI |
| 04. | Bolaang Mongondow Utara | N/A | - | INDOSTRI |
| 05. | Kepulauan Sangihe | N/A | - | KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI |
| 06. | Kepulauan Sitaro | N/A | - | SULAWESI UTARA |
| 07. | Minahasa | N/A | - | JOLAWESI OTAKA |
| 08. | Minahasa Tenggara | N/A | - | DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI |
| 09. | Kota Tomohon | N/A | - | KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, |
| 10. | Kepulauan Talaud | | | KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, |
| 11. | Minahasa Selatan | | | RELATIF |
| 12. | Minahasa Utara | Rendah | Prioritas 1 | RENDAH |
| 13. | Kota Kotamobagu | | | RENDAH |
| 14. | Kota Manado | | | |
| 15. | Kota Bitung | Tinggi | Prioritas 3 | RENDAH : 5 KABUPATEN/KOTA |
| | | | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | | | | SEDANG : - KABUPATEN/KOTA |
| | | | | TINGGI : 1 KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Permasalahan Utama: |
| | | | | Masih terbatasnya investasi di sektor industri di beberapa |
| | | | | kabupaten/kota. |
| | | | | Rendahnya produksi di sektor industri di beberapa |
| | | | | kabupaten/kota. |
| | | | | Masih rendahnya jumlah tenaga kerja yang bekerja |
| | | | | di sektor industri. |
| | | | | |

Hasil Analisis Tematik Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara



| No. | Kabupaten/Kota | Status | Lokasi | Tematik Pariwisata |
|-----|---------------------------|--------|---------------|--|
| 01. | Bolaang Mongondow Selatan | N/A | - | |
| 02. | Bolaang Mongondow Utara | N/A | - | RATA-RATA TINGKAT CAPAIAN TEMATIK |
| 03. | Minahasa Selatan | N/A | - | PARIWISATA |
| 04. | Minahasa Tenggara | N/A | - | FAMINISATA |
| 05. | Bolaang Mongondow | | | KABUPATEN/KOTA DI WILAYAH PROVINSI |
| 06. | Bolaang Mongondow Timur | | | SULAWESI UTARA |
| 07. | Kepulauan Sangihe | | | SULAWESI UTAKA |
| 08. | Kepulauan Sitaro | Rendah | Prioritas 1 | DILIHAT DARI ASPEK KATEGORI |
| 09. | Kepulauan Talaud | | | KETERSEDIAAN, AKSESIBILITAS, KETERJANGKAUAN, |
| 10. | Minahasa Utara | | | KEBERLANJUTAN DAN STABILITAS, |
| 11. | Kota Kotamobagu | | | RELATIF |
| 12. | Minahasa | | | RENDAH |
| 13. | Kota Bitung | G. L. | B 1 1 1 1 1 2 | KENDAH |
| 14. | Kota Manado | Sedang | Prioritas 2 | |
| 15. | Kota Tomohon | | | RENDAH : 7 KABUPATEN/KOTA |
| | | | | RENDAH : / KABUPATEN/KUTA |
| | | | | SEDANG : 4 KABUPATEN/KOTA |
| | | | | TINGGI : - KABUPATEN/KOTA |
| | | | | Permasalahan Utama: |
| | | | | Terbatasnya penunjang sektor pariwisata, seperti ketersediaan akomodasi, restoran dan infrastruktur pendukung lainnya, di beberapa kabupaten/kota. |
| | | | | |

Sektor Unggulan ³ Provinsi Sulawesi Utara

- Faktor pendorong pertumbuhan ekonomi provinsi Sulawesi Utara terutama bersumber dari sektor pertanian, transportasi dan industri pengolahan. Sektor pertanian diperkirakan tumbuh meningkat seiring dengan meningkatnya produksi tanaman pangan, perkebunan dan perikanan sebagai dampak dari kondisi cuaca yang diperkirakan membaik pada tahun 2018. Peningkatan produksi pertanian juga tidak terlepas dari bantuan saprodi dan pencetakan sawah yang terus digenjot oleh pemerintah daerah;
- Meningkatnya produksi pertanian akan berdampak positif pada kinerja industri pengolahan. Pasokan bahan baku perkebunan dan perikanan akan mendorong industri pengolahan tumbuh meningkat. Dari sisi eksternal, membaiknya perekonomian dunia dan perkiraan World Bank bahwa harga CNO akan naik 10% pada tahun 2018 akan turut mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan.
- Sektor transportasi diperkirakan meningkat seiring dengan peningkatan konsumsi rumah tangga, aktivitas ekspor-impor dan kunjungan wisatawan mancanegara;
- 4 Kinerja ekspor akan ditopang oleh pasokan bahan baku pada industri pengolahan dan juga dari sisi eksternal dimana perekonomian dunia semakin membaik serta harga komoditas dunia khususnya CNO diperkirakan meningkat tahun 2018.

³ Kajian Ekonomi Regional, Bank Indonesia.



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS Kedeputian Bidang Pengembangan Regional

Bab-5

PENUTUP



5.1. Kesimpulan

Mengacu kepada hasil analisis, sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab-4 Profil dan Analisis Daerah (PrADa) tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat capaian tematik RATA-RATA kabupaten/kota di wilayah provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:

- 1 Pendidikan, tingkat capaian SEDANG hingga RENDAH;
- 2 Kesehatan, tingkat capaian RENDAH;
- ğ Penanggulangan Kemiskinan, tingkat capaian SEDANG;
- Perumahan dan Permukiman, tingkat capaian RENDAH;
- 4 Ketahanan Pangan, tingkat capaian SEDANG;
- Ŏ Ketahanan Energi, tingkat capaian CUKUP TINGGI;
- Infrastruktur, tingkat capaian TINGGI hingga SEDANG;
- Industri, tingkat capaian RENDAH; dan Pariwisata, tingkat capaian RENDAH.

5.2. Rekomendasi

Profil dan Analisis Daerah (PrADa) ini, oleh para pemangku kepentingan dapat digunakan sebagai salah satu masukan untuk mempertajam dan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan, utamanya dalam rangka menyusun program/kegiatan sesuai dengan isu atau permasalahan daerah, sebagaimana yang telah diuraikan dan disajikan di dalam Bab-4 Profil dan Analisis Daerah (PrADa) provinsi Sulawesi Utara ini.

Metode analisis yang dipergunakan dalam penyusunan PrADa ini, melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Metode analisis ini relatif baru dan belum memiliki banyak referensi yang dapat digunakan, utamanya dalam rangka merumuskan program/kegiatan sesuai dengan isu atau permasalahan daerah. Oleh karenanya penerapan metode THIS dalam penyusunan PrADa ini, dapat dipergunakan sebagai salah satu instrumen dalam rangka mempersiapkan penyusunan background study RPJMN 2020-2024, yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.